



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN



LAPORAN KINERJA

Direktorat Jenderal Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan
dan Perikanan

Triwulan III

2024



KATA PENGANTAR

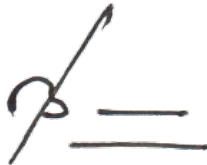


Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) Triwulan III Tahun 2024 disusun sebagai salah satu implementasi atas penyelenggaraan pemerintah yang baik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan 5 kebijakan ekonomi biru KKP, Ditjen PDSPKP memperkuat peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan konsumsi ikan di dalam negeri dan ekspor. Upaya memperkuat daya saing tersebut telah dijabarkan pada perjanjian kinerja Ditjen PDSPKP, yang juga menjadi ukuran dalam penilaian keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran program. Secara garis besar pencapaian kinerja Ditjen PDSPKP periode Triwulan III tahun 2024 ditunjukkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Ditjen PDSPKP sebesar 100,5 (Kategori Baik).

Akhir kata, semoga laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan atas mandat dan kinerja yang telah ditetapkan kepada kami. Dengan semangat internalisasi #KITAPDS yaitu Kompetensi, Inovasi-Integritas, Transparansi, Akuntabel dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi Ditjen PDSPKP dalam mendukung kebijakan ekonomi biru KKP.

Jakarta, 18 Oktober 2024



Budi Sulistiyo

TIM PENYUSUN

PENGARAH

Budi Sulistiyo

PENYUSUN

Machmud

Budi Yuwono

Yayuk Sukarsih

Agustina Pujiastuti

Andika Adisukma

Ayu Wahdania

Muqaramah Fitra Hasanah

Devi Sari

KONTRIBUTOR

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Ditjen PDSPKP telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Berdasarkan PK tersebut, terdapat 23 indikator kinerja yang terdiri dari 8 Indikator yang kegiatan bersifat triwulanan, 4 bersifat semesteran, dan 11 bersifat tahunan.

Sebanyak 23 indikator kinerja tersebut seluruhnya telah dilakukan pengukuran pada Triwulan III Tahun 2024. Hasil pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Ditjen PDSPKP pada Triwulan II Tahun 2024 yang ditunjukkan pada Aplikasi Kinerjaku adalah sebesar 100,5% (kategori Baik).

Perincian capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1. 13 indikator kinerja yang bersifat tahunan yaitu (1) Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing, (2) Konsumsi Ikan, (3) Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP), (4) Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP, (5) Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP, (6) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP, (7) Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP, (8) Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP, (9) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP, (10) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP, (11) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP, (12) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP, serta (13) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP.

2. Dua indikator kinerja yang bersifat semesteran yaitu Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP.
3. Delapan indikator kinerja yang bersifat triwulanan dengan presentase capaian terhadap triwulan II tahun 2024 yaitu :
 - a. Nilai Ekspor Hasil Perikanan dengan capaian (81,82%);
 - b. Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan dengan capaian 114,71%;
 - c. Kinerja Logistik Hasil Perikanan (105,22%);
 - d. Pembiayaan Usaha KP melalui Kredit Program (101,00%);
 - e. Nilai PNBP Ditjen PDSPKP 119,82%;
 - f. Tenaga Kerja Yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (107,78%);
 - g. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP (110,05%);
 - h. Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (141,84%).
4. Satu indikator kinerja yang belum mencapai target triwulan III tahun 2024 yaitu nilai ekspor hasil perikanan dengan persentase capaian 81,82% terhadap target Triwulan III Tahun 2024.
5. Alokasi anggaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah sebesar Rp386.899.151.000,00 yang seluruhnya merupakan APBN rupiah murni. Dari pagu anggaran tersebut, terdapat blokir sebesar Rp58.301.389.000,- sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp328.597.762.000,-. Penyerapan anggaran Ditjen PDSPKP sampai dengan triwulan III tahun 2024 adalah sebesar Rp167.818.373.874,- atau setara dengan 43,36% terhadap total pagu anggaran awal atau 51,06% terhadap pagu anggaran pasca blokir (pagu efektif). Berdasarkan data omspan terdapat outstanding

kontrak sebesar Rp60,570,783,118,00, sehingga realisasi anggaran Ditjen PDSPKP menjadi 69,50% dari pagu efektif atau 59,03% dari pagu anggaran awal.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTARI.....	I
TIM PENYUSUN	2
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	3
DAFTAR ISI	6
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Tugas dan Fungsi.....	2
D. Keragaaan Sumber Daya Manusia Aparatur.....	5
E. Permasalahan Utama.....	6
F. Sistematika Penyajian.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Rencana Strategis	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Capaian Kinerja.....	18
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	21
Sasaran Program 1. Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing.....	21
1. Volume produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	21
Sasaran Program 2. Ekonomi Subsektor Pengolahan dan Pemasaran Produk KP Meningkat.....	31
2. Nilai Ekspor Hasil Perikanan	31
3. Konsumsi Ikan.....	41
Sasaran Program 3. Terwujudnya pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel, dan Berkelanjutan.....	50
4. Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan.....	50
5. Kinerja Logistik Hasil Perikanan	57
6. Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program	65
7. Nilai PNBPD Ditjen PDSPKP	70
8. Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP	71
Sasaran 4. Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan Meningkat	73
9. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)	73
Sasaran 5. Tatakelola Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP	78
10. Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP	78

11. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP	81
12. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP	86
13. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP	91
14. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP	94
15. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP	95
16. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP	98
17. Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar.....	100
18. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP	102
19. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP	104
20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Ditjen PDSPKP	106
21. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkup Ditjen PDSPKP	109
22. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP...	111
23. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP	114
C. Realisasi Anggaran	117
BAB IV PENUTUP	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Permasalahan dan Rekomendasi.....	121
C. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024	122
LAMPIRAN.....	124
DAFTAR TABEL.....	8
DAFTAR GAMBAR.....	10
DAFTAR LAMPIRAN	14i

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2024	16
Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Ditjen PDSPKP Periode Triwulan III Tahun 2024.....	19
Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing.....	22
Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Hasil Perikanan	31
Tabel 5. Capaian Ekspor Periode Triwulan III tahun 2023-2024	32
Tabel 6. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Komoditas Utama Triwulan III Tahun 2024.....	32
Tabel 7. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor Triwulan III Tahun 2024.....	34
Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Konsumsi Ikan	42
Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan.....	51
Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Logistik Hasil Perikanan.....	58
Tabel 11. Ikhtisar Pencapaian Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program.....	66
Tabel 12. Rincian Pembiayaan Kredit Program di Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2023.....	67
Tabel 13. Ikhtisar Pencapaian Nilai PNBP Ditjen PDSPKP	71
Tabel 14. Ikhtisar Pencapaian Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP	72
Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)	74
Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Ditjen PDSPKP.....	79
Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP	82
Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPK.....	87
Tabel 19. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP	91
Tabel 20. Ikhtisar Pencapaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP	94
Tabel 21. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP	96

Tabel 22.	Data Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2024	97
Tabel 23.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP.....	99
Tabel 24.	Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar.....	101
Tabel 25.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP	102
Tabel 26.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP.....	93
Tabel 27.	Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Ditjen PDSPKP.....	105
Tabel 28.	Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkup Ditjen PDSPKP.....	107
Tabel 29.	Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP	109
Tabel 30.	Ikhtisar Pencapaian Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP.....	115
Tabel 31.	Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Kewenangan Triwulan II Tahun 2024.....	117
Tabel 32.	Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Jenis Kegiatan Triwulan II Tahun 2024.....	118
Tabel 33.	Permasalahan dan Rekomendasi atas Indikator kinerja yang tidak mencapai target pada Triwulan II Tahun 2024	121
Tabel 34.	Tindak Lanjut Rekomendasi pada laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024	122

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP	4
Gambar 2. Struktur Organisasi BBP3KP.....	5
Gambar 3. Keragaan SDMA Ditjen PDSPKP Tahun 2024.....	6
Gambar 4. Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2024	11
Gambar 5. NKO Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2024	18
Gambar 6. Rapat Konsensus RSNi3 Produk Perikanan.....	26
Gambar 7. Bimbingan Teknis Penerapan <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i>	23
Gambar 8. Keikutsertaan Pada Kegiatan valnas VPO Semester I Tahun 2024	25
Gambar 9. Penandatanganan Kontrak Konstruksi UPI Bernilai Tambah	25
Gambar 10. Pembinaan dalam rangka penerapan mutu dan keamanan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan Kab. Purwakarta	26
Gambar 11. Mendukung kampanye protein ikan.....	27
Gambar 12. Identifikasi dan pengumpulan data untuk penyusunan bahan RSNi serta rapat teknis RSNi	28
Gambar 13. Peta Sebaran Lokasi Produk Kelautan dan Perikanan yang Disertifikasi periode TW III Tahun 2024	28
Gambar 14. Diseminasi diversifikasi produk kelautan dan perikan.....	29
Gambar 15. Pelatihan Digital Marketing dan Monitoring evaluasi UMKM Inkubasi Bisnis Invapro KP.....	30
Gambar 16. Fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil KP	30
Gambar 17. Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Provinsi Asal Triwulan III Tahun 2024	35
Gambar 18. Koordinasi antara pengembang aplikasi bursa ikan	38
Gambar 19. serangkaian pertemuan dengan US Department of Commerce (USDOC) dan pihak terkait lainnya di Washington D.C.....	39
Gambar 20. Indo Fisheries 2024 Expo & Forum.....	41
Gambar 21. Penyusunan Buku Konsumsi dan Serapan Ikan	43
Gambar 22. Finalisasi data AKI.....	44

Gambar 23.	Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia dan Bangsa Berwisata di Indonesia (Gernas BBI/BBWI).....	46
Gambar 24.	Pembinaan Lembaga Pengelola Pasar Ikan	48
Gambar 25.	Penyerahan bantuan pemerintah berupa peralatan pemasaran di Kab. Cilacap dan Kab. Wonosobo	49
Gambar 26.	Capaian Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Sumber Permodalan Periode Triwulan III Tahun 2023-2024 (Rp Triliun)	51
Gambar 27.	Capaian Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Bidang Usaha Periode Triwulan III Tahun 2023-2024 (Rp Triliun)	52
Gambar 28.	Identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang investasi di Kota Tual Provinsi Maluku	54
Gambar 29.	Kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Maluku Tenggara	54
Gambar 30	Kegiatan penyampaian laporan penyusunan dokumen	55
Gambar 31	Survey dan dan FGD Penyusunan Dokumen Peluang Investasi Industri Pengolahan Ikan Terintegrasi di Kota Tual	55
Gambar 32	Pameran skala internasional Indo Fisheries 2024 Expo & Forum	56
Gambar 33	Pendampingan Minat Investasi	57
Gambar 34.	Konsultasi Publik Perubahan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang STELINA	60
Gambar 35.	Fasilitasi Akses Transportasi dan Distribusi Ikan Hias Menggunakan Moda Kereta Api.....	62
Gambar 36.	Gambar 36 Uji Coba Implementasi Pedoman dan Penilaian CDIB.....	64
Gambar 37.	Realisasi Pembiayaan Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan III Tahun 2024	67
Gambar 38.	Realisasi Pembiayaan Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan bidang usaha.....	68
Gambar 39.	Bimbingan Teknis Kelembagaan Usaha Subsektor Pengolahan dan Pemasaran untuk Wilayah	69
Gambar 40.	Kegiatan Pendampingan Wirausaha	69
Gambar 41	Kegiatan Fasilitasi Kemitraan dan Penguatan Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan	70
Gambar 42	Lokasi Sampling Perhitungan NTPH.....	74

Gambar 43	Rapat Koordinasi Rencana Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portable	75
Gambar 44	Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Bantuan Pemerintah Chest Freezer	76
Gambar 45	Rapat Koordinasi dengan Dinas KP penerima BP SPP	77
Gambar 46	Validasi Data dan Penghitungan Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) 2024	78
Gambar 47	Apel Pagi Lingkup Ditjen PDSPK	80
Gambar 48	Penyusunan Proses Bisnis Level 2 dan Cross Functional Map (CFM)	81
Gambar 49	Keikutsertaan pada kegiatan rekonsiliasi penjaminan kualitas maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 di Lingkungan KKP	86
Gambar 50	Rapat Koordinasi Nasional dan pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional bidang PDSPKP	88
Gambar 51	Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dan disiplin SDM Aparatur lingkup Ditjen PDSPKP	89
Gambar 52	Orientasi bagi PPPK Blended Learning	89
Gambar 53	Bimbingan Teknis Pembinaan Karakter dan Disiplin bagi Petugas PTSA Ditjen PDSPKP	90
Gambar 54	Kegiatan pengukuran dan pengisian capaian kinerja Ditjen PDSPKP	92
Gambar 55	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Ditjen PDSPKP Tahun Anggaran 2025	93
Gambar 56	Workshop Penulisan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada Wikipedia Bahasa Indonesia	93
Gambar 57	Keikutsertaan pada kegiatan Pleno Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik	100
Gambar 58	Capaian Manajemen Pengetahuan pada Triwulan III Tahun 2024	102
Gambar 60	Monitoring capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Satker lingkup Ditjen PDSPKP	105
Gambar 61	Koordinasi dengan seluruh Satker Sekeretariat Ditjen PDSPKP dan Tugas Pembantuan	106
Gambar 62	Update RUP dan Pencatatan Realisasi Paket PBJ Tahun Anggaran 2024 lingkup Ditjen PDSPKP	108
Gambar 63	Updating Progress Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	108
Gambar 64	Pemetaan dan Updating Pemanfaatan Bantuan Pemerintah	110

Gambar 65	Rapat Pemabahsan Kesepakatan BMN PIM dan Penyusunan RKBMN	114
Gambar 66	Sosialisasi Satu Data Statistik PDSPKP Tahun 2024	116

DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan untuk mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing tinggi sehingga dapat bersaing baik di pasar domestik maupun internasional. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan *market driven* atau pasar yang menjadi acuan kebijakan, sehingga ketersediaan produk dapat diterima dan diminati oleh konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus merupakan produk kelautan dan perikanan yang memiliki sifat *high quality, safe, traceable, high value content* dan *competitive*. Kebijakan ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahunan dan lima tahunan.

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Ditjen PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun dokumen perencanaan kinerja, pengukuran capaian kinerja, pengelolaan data

capaian kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik berdasarkan renstra maupun rencana kinerja tahunan yang dibuat sebelumnya. Dokumen ini menjadi sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini akan menginformasikan capaian kinerja periode triwulan I tahun 2024 atas pelaksanaan sasaran program dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2024 adalah untuk mengomunikasikan pencapaian sasaran program pada Triwulan III Tahun 2024 kepada *stakeholders* guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

C. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, kedudukan Ditjen PDSPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam kedudukannya, Ditjen PDSPKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

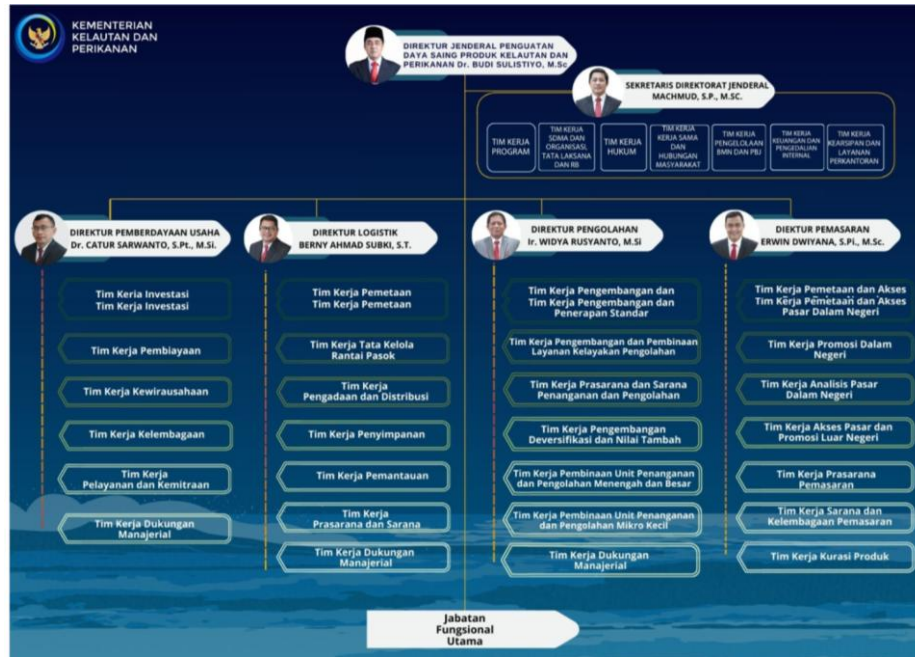
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ditjen PDSPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik

- produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
 3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk kelautan dan perikanan, peningkatan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan;
 6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Ditjen PDSPKP dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Usaha dan Investasi;
3. Direktorat Logistik;
4. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu;
5. Direktorat Pemasaran.



Gambar 1 Struktur Organisasi Ditjen PDSPKP

Ditjen PDSPKP memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 68/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan, BBP3KP mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan;
2. Pelaksanaan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;

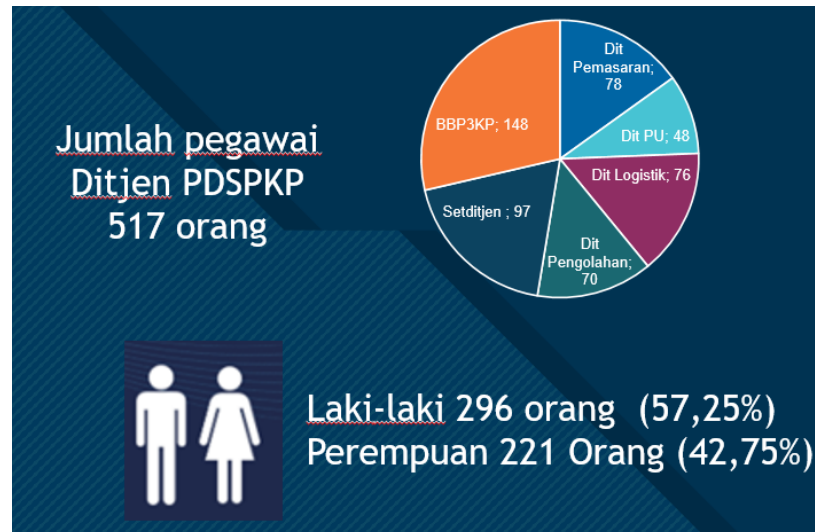
3. Pelaksanaan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan penyiapan bahan standarisasi pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
5. Pelaksanaan sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tanda kesesuaian produk kelautan dan perikanan;
6. Pelaksanaan pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
7. Pelaksanaan bimbingan teknis hasil uji terap, pengujian, dan sertifikasi produk kelautan dan perikanan; dan
8. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.



Gambar 2 Struktur Organisasi BBP3KP

D. Keragaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Jumlah pegawai Ditjen PDSPKP Tahun 2024 mencapai 518 orang yang terdiri dari 297 pegawai Laki-laki dan 221 pegawai perempuan, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 3 Keragaan SDMA Ditjen PDSPKP Tahun 2024

E. Permasalahan Utama

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi terbagi dalam enam kelompok besar, yaitu tantangan peningkatan investasi dan pengembangan usaha, permasalahan efisiensi biaya logistik hasil kelautan dan perikanan, tantangan peningkatan ekspor ikan, ancaman *stunting*, permasalahan peningkatan kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan skala usaha mikro kecil, dan permasalahan peningkatan usaha pengolahan skala menengah besar yang berkelanjutan. Tantangan peningkatan investasi dan pengembangan usaha umumnya terkait akses pembiayaan yang terbatas, kapasitas kelembagaan yang masih rendah dan cenderung lambat, infrastruktur perikanan yang belum memadai dan tidak merata di setiap wilayah. Kesulitan akses pembiayaan terutama terjadi pada pelaku usaha mikro kecil kelautan dan perikanan, karena belum *bankable* dalam skema pembiayaan dan kelayakan usaha. Di sisi lain, perbankan dan lembaga pemberi kredit minim informasi tentang calon debitur potensial. Beberapa pelaku usaha masih mengalami

hambatan berusaha dan investasi terutama terkait perizinan, pajak, dan tumpang tindih regulasi. Namun bagi investor besar, tantangan yang dihadapi adalah minimnya informasi peluang usaha dan investasi kelautan dan perikanan yang salah satunya karena ketersediaan profil investasi yang *ready to offer* serta promosi usaha dan investasi yang belum berjalan optimal.

Pada tahap implementasi investasi, pelaku investasi kelautan dan perikanan sering terkendala tarif bea masuk barang modal (izin/pajak) yang masih tinggi, sementara insentif investasi yang diberikan belum berjalan optimal. Penyederhanaan birokrasi investasi melalui perizinan *online* yang dikembangkan Ditjen PDSPKP dan sistem perpajakan yang lebih baik, diharapkan dapat memberi solusi. Untuk permasalahan efisiensi biaya logistik hasil kelautan dan perikanan, masih terkait tata kelola dan koordinasi logistik antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan swasta yang belum optimal, sarana dan prasarana logistik yang belum memadai, serta pengelolaan kelembagaan logistik yang belum optimal. Kondisi tersebut menyebabkan biaya logistik yang sangat tinggi di Indonesia, yaitu mencapai 27% terhadap PDB, di mana aktivitas logistik hasil kelautan dan perikanan menjadi salah satu penyumbang utamanya. Bank Dunia (2018) menyatakan kinerja logistik Indonesia berada pada *ranking timeline* 41 dengan skor 3,67. Kinerja tersebut jauh di bawah Singapura (*ranking* 6, skor 4,32) dan tiga negara ASEAN lainnya (Thailand, Vietnam, dan Malaysia).

Di sisi sarana dan prasarana logistik, ketersediaan *cold storage*, pabrik es, dan gudang kering yang digunakan untuk penyimpanan produk kelautan dan perikanan belum merata di koridor logistik ikan, serta kapasitasnya juga masih terbatas. Sarana transportasi seperti mobil berpendingin dan mobil angkut ikan hidup jumlahnya juga sangat sedikit. Dari sisi rantai suplai, konektivitas dan informasi logistik yang ada masih bersifat asimetris, dimana aliran informasi ketersediaan ikan dari sentra produksi ke sentra distribusi/pemasaran yang

membutuhkan ikan sering tersendat, tidak lengkap, dan lambat. Hal ini perlu dipecahkan dengan mengembangkan Sistem Telusur Logistik Ikan (STELINA) yang lebih baik dan implementasinya dapat berimprovisasi dengan IoT system.

Untuk ekspor hasil kelautan dan perikanan, terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang sedang dihadapi terkait dalam pencapaian target ekspor, yaitu:

1. Kapasitas pasokan produksi dan pemenuhan kualitas bahan baku untuk ekspor belum maksimal;
2. Belum kompetitifnya produk perikanan di pasar utama dunia (rendahnya *market share*);
3. Diversifikasi pasar dan produk ekspor belum optimal, hambatan ekspor di negara tujuan baik tarif maupun non tarif (SPS dan TBT);
4. Adanya hambatan registrasi dan penambahan eksportir terdaftar di negara tujuan ekspor antara lain Uni Eropa, Rusia, RRT, Arab Saudi, dan Brazil;
5. Rendahnya utilitas UPI untuk tujuan ekspor.

Ancaman *stunting* (gizi buruk) merupakan masalah yang erat kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia Indonesia. *Stunting* timbul salah satunya karena terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap ikan, terutama di wilayah pedalaman dan aksesnya jauh ke pesisir, harga ikan yang cenderung fluktuatif dipengaruhi oleh musim, dan rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya ikan untuk asupan protein dan gizi. Akibatnya, sering tidak peduli dalam pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari. Di samping itu, mutu ikan yang dijual di pasar-pasar yang jauh dari pesisir terutama yang pengelolaannya tradisional umumnya kurang baik, sehingga minat beli masyarakat turun. Beberapa wilayah juga belum menjadikan ikan sebagai sumber utama protein bagi keluarganya. Pemenuhannya diperoleh dari sumber nabati yang konsumsinya juga terbatas. Dalam hal pengembangan usaha skala mikro kecil, kapasitas produksi dan mutu produk olahan perikanan yang

dihasilkannya masih rendah, sedangkan menjadi pelaku utama dalam penyediaan produk ikan di Indonesia termasuk ke pasar-pasar pedalaman. Akibatnya banyak dari mereka yang belum memenuhi standar kelayakan pengolahan. Hingga saat ini, jumlah usaha mikro kecil kelautan dan perikanan yang telah memiliki Sertifikasi Kelayakan Pengolahan masih di bawah 1%.

Penyebab utama dari rendahnya kapasitas usaha dan mutu produk olahan perikanan skala usaha mikro kecil di Indonesia diantaranya pengetahuan para pelaku usaha mikro kecil tentang standar mutu yang masih rendah, penyebaran usaha yang luas dan terfragmentasi, belum melaksanakan prinsip-prinsip usaha secara profesional, serta klusterisasi usaha skala mikro kecil yang belum berjalan baik. Akibatnya, pelaku usaha mikro kecil kelautan dan perikanan sering berjalan sendiri tanpa terdeteksi dan mengembangkan usaha dan mutu produk dengan kemampuan terbatas yang dimiliki. Permasalahan teknologi, modal, informasi dan akses pasar, serta perizinan juga banyak dihadapi pelaku usaha mikro kecil kelautan dan perikanan di hampir semua wilayah. Dalam hal pengembangan pasar, pelaku aktif sangat potensial untuk menghasilkan produk UKM kapasitas ekspor namun masih minim pembinaan.

Keterbatasan sarana dan prasarana pengolahan dan Sistem Rantai Dingin (SRD) serta minimnya pengetahuan pelaku UMKM terkait standar teknis mutu produk kelautan dan perikanan (GMP, SSOP, HACCP, *traceability*) menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan produk ekspor UMKM kelautan dan perikanan.

Usaha pengolahan skala menengah besar juga memiliki permasalahan yang tidak kalah kompleks. Dalam hal peningkatan kapasitas usaha, pelaku usaha pengolahan skala menengah besar masih dihadapkan dengan permasalahan utilitas rendah, kompetisi pemenuhan bahan baku, fasilitas infrastruktur penunjang produksi yang terintegrasi, dan revitalisasi Sistem Rantai Dingin (SRD) yang belum optimal. Akibatnya sering kesulitan dalam memenuhi

permintaan pasar berskala besar, terutama yang sifatnya kontinyu. Persaingan bahan baku meningkat pada musim paceklik, sementara di saat banyak ikan tidak bisa menyetok karena tidak memiliki infrastruktur rantai dingin. Hal ini terus berulang setiap tahunnya, dan beberapa yang tidak kuat bersaing terpaksa menutup usahanya.

Dari sisi pengembangan mutu, usaha pengolahan skala menengah besar banyak yang belum sepenuhnya mengolah ikan tersertifikasi, belum terfasilitasi penerbitan standar teknis mutu (GMP, SSOP, HACCP, *Traceability*), dan belum memiliki sertifikat lingkungan. Permasalahan ini menjadi penghambat beberapa usaha pengolahan skala menengah besar dalam memanfaatkan peluang ekspor produk kelautan dan perikanan. Hal tersebut perlu dijadikan fokus dalam upaya penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan ke depan, sehingga mendukung peningkatan ekspor dan konsumsi ikan dalam negeri. Introduksi konsep-konsep Revolusi Industri 4.0 seperti digitalisasi usaha, perizinan *online*, lelang *online*, dan *block chain* dalam penelusuran bahan baku/logistik ikan perlu dilakukan. Perizinan *online* perlu terus disempurnakan dalam rangka fasilitasi kemudahan berusaha.

F. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan II Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja Ditjen PDSPKP pada Triwulan I Tahun 2024. Capaian Kinerja (*Performance Results*) Triwulan II Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP

Mengacu pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Birokari Nomor 53 Tahun 2014



BAB I

PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum tentang Ditjen PDSPKP dengan penekanan kepada aspek strategis Ditjen PDSPKP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Ditjen PDSPKP tahun 2024



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan capaian kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan III tahun 2024 dan Analisisnya



BAB IV

PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Ditjen PDSPKP serta Langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya



BAB V

LAMPIRAN

Menyajikan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan hal-hal lain yang dianggap perlu

Gambar 4 Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2024

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam rangka memberikan pandangan ke depan terkait dengan kinerja dan peran Ditjen PDSPKP serta gambaran kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen PDSPKP, maka dirumuskan visi Ditjen PDSPKP sebagai berikut.

VISI

“Mewujudkan Pengelolaan Perikanan dan Kelautan yang Berkelanjutan untuk Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Industri”

Sejalan dengan visi tersebut, telah dirumuskan misi Ditjen PDSPKP berupa upaya-upaya yang akan ditempuh sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PDSPKP sebagai berikut.

MISI

Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui Peningkatan Mutu, Daya Saing dan Penguatan Sistem Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan;
Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya lingkup Ditjen PDSPKP.

Tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan antara lain:

1. Meningkatkan investasi dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan, yaitu dengan berbagai upaya untuk :
 - Meningkatkan nilai investasi pada usaha kelautan dan perikanan baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) dan *joint venture*, yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah kemitraan investasi, jumlah fasilitasi perizinan, ketertarikan terhadap promosi investasi, dan pemanfaatan paket investasi yang disediakan pemerintah;
 - Mengembangkan usaha hasil kelautan dan perikanan melalui pembiayaan lembaga keuangan bank dan bukan bank. Hal ini yang ditunjukkan dengan meningkatnya pelayanan pembiayaan usaha, berkembangnya kemitraan inti plasma dan sejenisnya, meningkatnya penjangkauan akses debitur, pendampingan akses permodalan, pengembangan skema pembiayaan digital (*fintech*), tumbuhnya wirausaha baru, magang calon wirausaha, serta penguatan inkubator bisnis.
2. Memperkuat dan mewujudkan efisiensi kinerja logistik hasil kelautan dan perikanan, yaitu upaya pengembangan aktivitas logistik yang memiliki jaringan/konektivitas yang kuat di pusat produksi, pusat pengumpulan produk, pusat distribusi, dan pasar produk. Hal tersebut ditunjukkan dengan menguatnya struktur ekonomi pelaku logistik produk kelautan dan perikanan, kebutuhan dan ketersediaan produk yang lebih terjamin, sarana penyimpanan dan *buffer stock* hasil kelautan dan perikanan yang berfungsi baik, sistem distribusi dan jasa logistik yang berjalan baik, tata niaga dan pengelolaan koridor logistik yang lebih baik;
3. Memperkuat dan mengembangkan akses pasar hasil kelautan dan perikanan dalam dan luar negeri, merupakan upaya untuk :

- Meningkatkan konsumsi ikan dan penanganan *stunting*, yang ditunjukkan dengan meningkatnya aktivitas transaksi di pasar ikan modern, pasar ikan bersih, pasar ikan lokal, dan sentra kuliner, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan dan bazar produk perikanan, menyebarkan peta preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri, meningkatnya pemanfaatan alat dan sarana pemasaran ikan yang diberikan oleh pemerintah, berkurangnya penyakit akibat gizi buruk dan protein kurang, dan terjadinya penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai sarana;
 - Meningkatkan ekspor hasil perikanan, yang ditunjukkan dengan berkembangnya jaringan perdagangan internasional hasil perikanan baik secara bilateral, regional maupun multilateral, dan meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan;
4. Meningkatkan produk kelautan dan perikanan yang bermutu dan bernilai tambah, yaitu berbagai upaya untuk:
- Meningkatkan kapasitas produksi dan penerapan standar mutu baik pada UPI skala menengah besar maupun UPI skala mikro kecil, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kebutuhan bahan baku UPI, meningkatnya utilitas UPI, meningkatnya pengurusan sertifikat dan standar mutu pada UPI, dan berkembangnya aktivitas fasilitasi sarana prasarana pengolahan ikan;
 - Meningkatkan pengusahaan produk bernilai tambah, yang ditunjukkan dengan berkembangnya UPI bernilai tambah menuju *zero waste*, berkembangnya UPI yang menggunakan teknologi pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta meningkatnya produk-produk inovasi yang bernilai tambah;
 - Menambah kepedulian terhadap kelayakan pengolahan di UPI, yang ditunjukkan dengan dirumuskannya standar kelayakan pengolahan hasil perikanan, penerbitan SNI produk kelautan dan perikanan, dan pengurusan SKP secara *online*.

5. Mengembangkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, yaitu upaya untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang efektif, bersih dan terpercaya yang ditunjukkan dengan dukungan manajemen yang handal dan terpercaya di lingkungan Ditjen PDSPKP, dukungan sarana dan prasarana internal yang mumpuni, layanan perkantoran yang cepat dan bersih.

Arahan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada 4 (empat) bidang tersebut dijelaskan :

Meningkatkan investasi dan pengembangan usaha kelautan dan perikanan (bidang usaha dan investasi). Untuk mencapai tujuan ini, maka kebijakan dapat diarahkan pada :

- Kebijakan PDSPKP-1 : Peningkatan investasi kelautan dan perikanan;
- Kebijakan PDSPKP-2: Pengembangan usaha kelautan dan perikanan.

Memperkuat dan mewujudkan efisiensi kinerja logistik hasil Kelautan dan perikanan (bidang logistik). Arahan kebijakannya adalah :

- Kebijakan PDSPKP-3 : Pengembangan sistem logistik ikan dalam rangka konektivitas dari pusat produksi, pusat pengumpulan ke pusat distribusi/pasar (koridor);

Meningkatkan ekspor hasil perikanan (bidang pemasaran). Untuk mencapai tujuan ini, maka kebijakan dapat diarahkan pada :

- Kebijakan PDSPKP-4 : Fasilitasi dan keikutsertaan Indonesia dalam forum dialog/persidangan skala internasional dan promosi terkait dengan produk perikanan Indonesia di pasar internasional;

Meningkatkan konsumsi ikan dan penanganan *stunting* (bidang pemasaran). Arahan kebijakannya adalah :

- Kebijakan PDSPKP-5 : Fasilitasi dan pemberian bantuan pemerintah dan pembinaan kepada pemerintah daerah, masyarakat, kelompok usaha dalam

rangka peningkatan konsumsi makan ikan dan pengurangan *stunting* dalam masyarakat;

Meningkatkan produk kelautan dan perikanan yang bermutu dan bernilai tambah (bidang pengolahan dan bina mutu). Untuk mencapai tujuan ini, maka kebijakan dapat diarahkan pada :

- Kebijakan PDSPKP-6 : Peningkatan kapasitas produksi dan penerapan standar mutu pada UPI skala menengah besar;
- Kebijakan PDSPKP-7 : Peningkatan kapasitas produksi dan penerapan standar mutu pada UPI skala mikro kecil;
- Kebijakan PDSPKP-8 : Pengembangan produk kelautan dan perikanan bernilai tambah;
- Kebijakan PDSPKP-9 : Penerapan standar kelayakan pengolahan di Unit Pengolahan Ikan (UPI).

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai upaya perbaikan perencanaan, Ditjen PDSPKP melakukan reviu terhadap Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pada tahun 2023, masukan dari Sekretariat Jenderal KKP, serta rekomendasi dari Inspektorat Jenderal KKP.

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Ditjen PDSPKP Tahun 2024

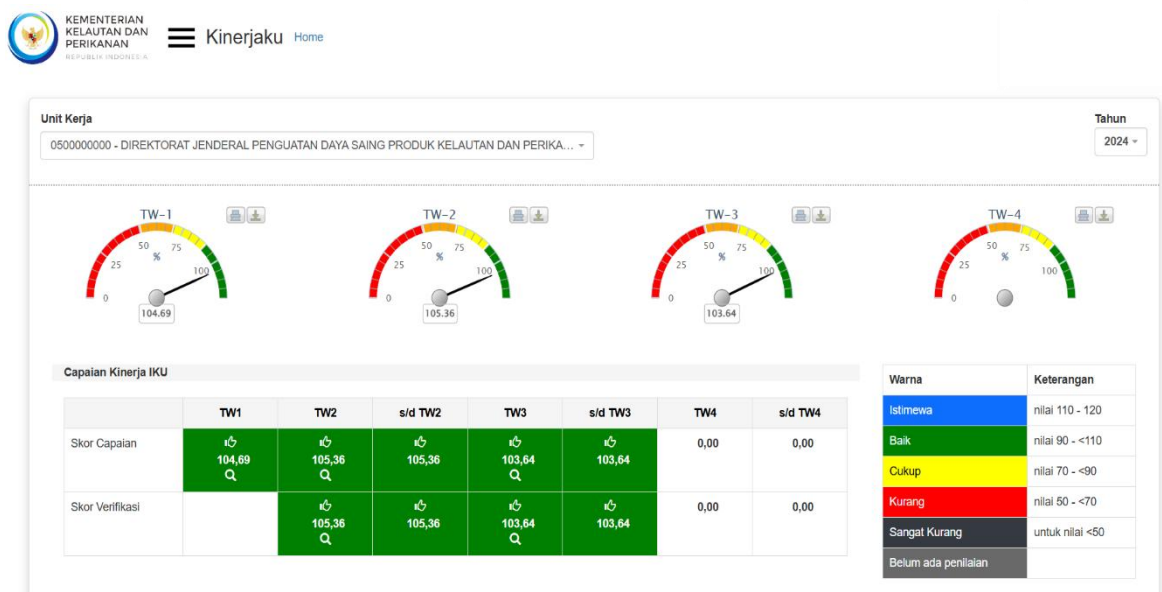
SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1	Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing	1.	Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (Juta Ton)	7,5
2	Ekonomi Subsektor Pengolahan dan Pemasaran Produk KP Meningkat	2.	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	7,2
		3.	Konsumsi Ikan (setara utuh segar) (kg/kapita)	59
3	Terwujudnya pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel, dan berkelanjutan	4.	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	9
		5.	Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	71,9
		6.	Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program	10,26

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
			(Rp. Triliun)	
		7.	Nilai PNBPD Ditjen PDSPKP (Rp. Miliar)	7,62
		8.	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	66.000
4	Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan meningkat	9.	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Indeks)	104,75
5	Terkelolanya Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP	10.	Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP (Unit)	2
		11.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	3,3
		12.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP (Indeks)	87
		13.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	84
		14.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	≤0,5
		15.	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP (%)	80
		16.	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	76
		17.	Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)	94
		18.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	93,76
		19.	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP (Nilai)	86
		20.	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	80
		21.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	80
		22.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	80
		23.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	91

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Triwulan III tahun 2024 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Ditjen PDSPKP dari Januari sampai dengan September 2024. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara terukur keseluruhan yang bisa diperoleh dari Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). NKO Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar 103,64. Capaian NKO pada triwulan ini mengalami penurunan 1,61% dibandingkan dengan capaian NKO pada triwulan sebelumnya yaitu sebesar 105,36. Capaian NKO pada triwulan III sebagaimana terdapat pada Gambar 5.



Gambar 5 NKO Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2024

Target Sasaran Program dan Indikator Kinerja Ditjen PDSPKP pada Triwulan III Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Ditjen PDSPKP Periode Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja		Target		Realisasi TW III 2024	Persentase terhadap Target (%)	
		Tahun 2024	TW III 2024		Tahun 2024	TW III 2024
1	Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (Juta Ton)	7,5	-	-	-	-
2	Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	7,2	5,17	4,23	58,75%	81,82%
3	Konsumsi Ikan (setara utuh segar) (kg/kapita)	59	-	-	-	-
4	Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	9	6,8	7,8	86,67%	114,71%
5	Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	71,9	71,9	75,65	105,22%	105,22%
6	Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	10,26	6	6,06	59,06%	101,00%
7	Nilai PNBP Ditjen PDSPKP (Rp. Miliar)	7,62	5,7	6,83	89,63%	119,82%
8	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	66.000	38.010	40.967	62,07%	107,78%
9	Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Indeks)	104,75	-	-	-	-
10	Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP (Unit)	2	-	-	-	-
11	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)*	3,3	-	-	-	-

Indikator Kinerja		Target		Realisasi TW III 2024	Persentase terhadap Target (%)	
		Tahun 2024	TW III 2024		Tahun 2024	TW III 2024
12	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP (Indeks)	87	-	-	-	-
13	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	84	-	-	-	-
14	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	≤0,5	-	-	-	-
15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	80	80	95,24	119,05%	119,05%
16	Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	76	-	-	-	-
17	Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94	94	133,33	141,84%	141,84%
18	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	93,76	-	-	-	-
19	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP (Nilai)	86	-	-	-	-
20	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	80	-	-	-	-
21	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan	80	-	-	-	-

Indikator Kinerja		Target		Realisasi TW III 2024	Persentase terhadap Target (%)	
		Tahun 2024	TW III 2024		Tahun 2024	TW III 2024
	Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)					
22	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	80	-	-	-	-
23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	91	-	-	-	-

*angka sementara

**angka prognosa

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen PDSPKP. Analisis untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerja utama dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Program 1. Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing

1. Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing

Pengolahan ikan memiliki dua peran dalam produksi perikanan, pertama untuk menyerap produksi perikanan dan kedua meningkatkan nilai tambah produk kelautan dan perikanan. Industri perikanan yang berdaya saing tinggi dapat dicirikan dengan terintegrasikannya kegiatan produksi perikanan, baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dengan usaha pengolahan hasil perikanan. Menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Data Induk Produk Kelautan dan

Perikanan, Jenis Kegiatan Pengolahan dibagi menjadi 13 yaitu: (1) Pendinginan/pengesan ikan, (2) Pembekuan ikan, (3) Penggaraman/Pengeringan ikan, (4) Pemindangan ikan, (5) Pengasapan/Pemanggangan ikan, (6) Peragian/fermentasi ikan, (7) Pengalengan ikan, (8) Pengolahan berbasis lumatan daging ikan/*jelly* ikan atau surimi, (9) Pengolahan kerupuk ikan, kripik, peyek ikan, (10) Pembuatan minyak ikan, (11) Pengolahan rumput laut, (12) Pengolahan lainnya, (13) Penanganan ikan.

Tabel 3 Ikhtisar Pencapaian Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	S.d TW III 2024			TW II 2024	TW III 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Volume Produk Olahan Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing (Juta Ton)	-	2,5	-	7,5	-	3,49	-	-	-	-	-	-

*angka prognosa capaian 2024
Sumber Data: Ditjen PDSPKP

Indikator kinerja Volume produk olahan kelautan dan perikanan berdaya saing pada tahun 2024 ditargetkan 7,5. Indikator kinerja bersifat semesteran, sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan III tahun 2024 serta belum dapat dibandingkan baik dengan target tahunan dan capaian triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Volume produk olahan kelautan dan perikanan sebesar Rp26.618.820.000,- sampai dengan periode Triwulan III tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp9.823.292,00 atau setara dengan 36,09%.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- a. Melaksanakan penyusunan RSNi Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang merupakan rekomendasi kebijakan dalam bentuk rancangan standar yang dirumuskan dan disusun oleh Komite Teknis (Komtek) sesuai dengan ruang lingkup dalam International Classification for Standards (ICS). Komtek tersebut dibentuk oleh Instansi Teknis Pengampu yang dalam hal ini dapat berasal dari K/L atau organisasi masyarakat. Sampai dengan triwulan III telah melaksanakan pembahasan 9 RSNi Produk Perikanan yaitu (1) Ikan renyah, (2) Bandeng duri lunak, (3) Ikan asap dengan pengasapan dingin, (4) Kerupuk ikan, udang, dan moluska, (5) Bandeng isi, (6) Kukis ikan, (7) Cara uji fisika – Bagian 8 penentuan berat bersih dan bobot tuntas produk perikanan sterilisasi komersial, (8) Cara uji kimia: penentuan kadar timar (Sn) pada produk perikanan dengan Hydride – Spektroskopi atom (HG-AAS), (9) Hidrolisat Protein Ikan. Dan 6 RSNi Produk Perikanan Non Pangan yaitu (1) Ikan hias mas koki (*Carassius auratus*) – Syarat mutu dan penanganan, (2) Tanaman hias air mikrosorum (*Micosorum pteropus*) – Syarat mutu dan penanganan, (3) Ikan hias rainbow (*Melanotaenia spp*) - syarat mutu dan penanganan, (4) Ikan hias guppy (*Poecilia spp*) - Syarat mutu dan penanganan (5) Ikan hias cardinal - Syarat mutu dan penanganan dan (6) *Spirulina spp* kering – syarat mutu dan pengolahan.

Selain itu dilakukan juga Rapat Teknis RSNi pada 10 Produk Perikanan antara lain yaitu (1) Ikan renyah, (2) Bandeng duri lunak, (3) Ikan asap dengan pengasapan dingin, (4) Kerupuk ikan, udang dan moluska, (5) Bandeng isi, (6) Kukis ikan, (7) Pegemasan ikan segar atau ikan hidup maupun yang sejenisnya dan metode pengemasannya melalui sarana transportasi udara, (8) Cara uji fisika - Bagian 8 Penentuan berat bersih dan bobot tuntas produk perikanan sterilisasi komersial, (9) Cara uji kimia: penentuan kadar timah (Sn) pada produk

perikanan dengan Hydride - spektroskopi serapan atom (HG-AAS), (10) Hidrolisat Protein Ikan.



Gambar 6 Rapat Konsensus RSNI3 Produk Perikanan

- b. Melaksanakan kegiatan Penerbitan sertifikat kelayakan pengolahan (SKP)/ Sertifikat *good manufacturing practiprofillingce* (GMP) melalui Koordinasi Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dan Persiapan Pembinaan HACCP bagi UPI. Pada periode triwulan III jumlah sertifikat yang diterbitkan sebanyak 478 sertifikat sehingga sampai dengan periode triwulan III jumlah total SKP yang telah diterbitkan sebanyak 2.487 sertifikat. Terdapat perubahan organisasi serta tugas dan fungsi direktorat pengolahan dan bina mutu menjadi direktorat pengolahan. Oleh karena itu, sejak tanggal 30 Juli 2023, penerbitan SKP tidak dilakukan oleh direktorat pengolahan melainkan oleh BPPMHKP sehingga capaian penerbitan SKP di TW III hanya ada di bulan Juli 2024.



Gambar 7 Bimbingan Teknis Penerapan *Hazard Analysis Critical Control Point*

- c. Melaksanakan Profiling Industri pengolahan Hasil Perikanan melalui beberapa kegiatan antara lain monitoring dan updating pendataan VPO SMT I Tahun 2024, dan keikutsertaan Pada Kegiatan valnas VPO Semester I Tahun

2024.



Gambar 8 Keikutsertaan Pada Kegiatan valnas VPO Semester I Tahun 2024

- d. Pembangunan unit pengolahan ikan (UPI) bernilai tambah menggunakan bioteknologi untuk menghasilkan Hidrolisat Protein Ikan (HPI) di Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Sampai dengan triwulan III tahapan kegiatan yang telah dilakukan adalah penandatanganan kontrak untuk konstruksi bangunan UPI bernilai tambah. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain, penandatanganan kontrak konstruksi UPI Bernilai Tambah, dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung.



Gambar 9 Penandatanganan Kontrak Konstruksi UPI Bernilai Tambah

- e. Melaksanakan Pembinaan unit penanganan dan unit pengolahan hasil KP skala mikro dan kecil terkait kelayakan dasar pengolahan bagi UPI Skala Mikro dan Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya jaminan mutu dan keamanan pangan bagi masyarakat dan pelaku usaha

bidang perikanan. Sampai dengan periode triwulan III telah tercapai 1.430 UMKM yang dibina di lokasi Bali, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.



Gambar 10 Pembinaan dalam rangka penerapan mutu dan keamanan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan Kab. Purwakarta

- f. Melaksanakan Pembinaan UPI skala menengah besar melalui koordinasi dan diskusi dengan melakukan kunjungan lapang ke UPI di Jawa Timur, melaksanakan FGD Peningkatan Produktivitas UPI Pengalengan dan Kunjungan lapangan ke beberapa UPI Pengalengan Ikan. Pada triwulan III telah tercapai 200 UPI sehingga sampai dengan periode triwulan III telah tercapai 460 UPI yang dibina.
- g. Melaksanakan Pembinaan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil KP Skala Mikro dan Kecil dalam rangka peningkatan ragam dan diversifikasi produk untuk membina pelaku usaha agar bisa menghasilkan ragam produk perikanan yang bermutu, berkualitas dan berdaya saing. Selain itu juga dilaksanakan kampanye protein ikan, dan sosialisasi mutu dan nilai tambah produk perikanan di 13 lokasi yaitu di Kabupaten Temanggung, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Sikka, Kota Bantaeng, Kab. Bima, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Pangandaran, Kota Samarinda, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Batubara, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Blora, Kabupaten Bone pada periode Juli – September 2024. Sampai dengan periode triwulan III telah tercapai 600 UMKM yang dibina.



Gambar 11. Mendukung kampanye protein ikan

- h. Melaksanakan Penyiapan Bahan RSNI hasil Kelautan dan perikanan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain Identifikasi dan pengumpulan data untuk penyusunan bahan RSNI : (1) kerupuk ikan, udang dan molusca pada PT. Golden Snack Mas Sejahtera, PT Cassana Naturindo, dan UKM Darma Tirta (2) Bandeng Duri Lunak pada Cindy Group Bogor, (3) Metode Uji Kimia Penentuan Kadar Timah (Sn) pada Produk Perikanan secara Spektroskopi Serapan Atom - Generator Hidrida (HG-AAS) pada UPTD. Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (PMP2KP) Banyuwangi, (4) Metode uji fisika bagian 8 penentuan berat bersih dan bobot tuntas produk perikanan 2372.8:2019 di di Surabaya dan Pasuruan, (5) Bandeng Isi pada UKM Hj. Laila, UKM Bogarasa Utama dan Poklahsar D'Krobyokan, dan (6) Ikan Renyah pada UKM Suhada Food, UKM Krezfish, UKM Nayara Food, UKM Anugrah, UKM Rizki Food, dan UKM Berkahna72. Selain itu juga melaksanakan kegiatan rapat pembahasan tindak lanjut hasil rapat teknis RSNI2 produk kelautan perikanan, serta rapat penyusunan bahan RSNI3 produk kelautan dan perikanan.



Gambar 12 Identifikasi dan pengumpulan data untuk penyusunan bahan RSNi serta rapat teknis RSNi2

- i. Melaksanakan layanan sertifikasi SNI dan pengujian produk kelautan dan perikanan sebagai upaya penjaminan mutu serta peningkatan daya saing produk olahan. Sampai dengan triwulan III tahun 2024, capaian kegiatan jumlah produk kelautan dan perikanan yang disertifikasi dan diuji sebanyak 827 produk dari target 500 produk, dengan rincian 87 produk yang disertifikasi dan 740 produk yang diuji.



Gambar 13 Peta Sebaran Lokasi Produk Kelautan dan Perikanan yang Disertifikasi periode TW III Tahun 2024

- j. Diseminasi diversifikasi produk kelautan dan perikanan telah dilakukan melalui dua kegiatan: (a) penyusunan media informasi diversifikasi produk kelautan dan perikanan berupa penyusunan konten media sosial selama periode triwulan III tercatat sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) konten, Penyusunan konten website Ditjen PDSPKP terkait Profil BBP3KP, desain

banner sebanyak sebanyak 5 (lima) judul (1) Menyeleksi dan menangani bahan baku sesuai standar kesegaran ikan berdasarkan prinsip Good Handling Practices (GHP), 2) Menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan berdasarkan konsepsi Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP), 3) Mengemas dan menyimpan produk perikanan sesuai dengan spesifik produk, 4) Inbis Invapro KP, dan 5) Layanan Sertifikasi Produk. BBP3KP juga menyusun booklet Hidrolisat Protein Ikan (HPI), booklet Hidrolisat Protein Ikan Wujudkan Generasi Emas Indonesia, dan video profil tenant Inbis Invapro KP. (b) Penyebarluasan informasi. Penyebarluasan informasi sampai dengan Triwulan III dilakukan pada 19 event diseminasi diversifikasi produk kelautan dan perikanan yang tersebar di Jakarta, Cibubur, Cibinong, Tulungagung, Depok, Cirebon, Surabaya dan Semarang dengan total penerima informasi sampai dengan bulan September yaitu 810 orang;



Gambar 14 Diseminasi diversifikasi produk kelautan dan perikan

- k. Melaksanakan Pengembangan Usaha Produk Kelautan dan Perikanan dalam Inkubasi Bisnis Invapro KP yang meliputi pelatihan digital marketing dengan topik optimalisasi google my business dan SEO (search engine optimization), optimasi Whatsapp Business, Google Ads dan Instagram Ads untuk Scale Up Produk; monitoring dan evaluasi UMKM MN Corner, UMKM Hanafa Food, UMKM Mie Sehat Cempaka, UMKM Tunacha, UMKM KUB Hurnala; pembahasan produk terhadap hasil uji organoleptik dan pembinaan performa produk; revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan; finalisasi desain kemasan produk unggulan tenant; kurasi pemeringkatan lembaga Inkubator

2024 oleh Kementerian Koperasi dan UKM; dan *bussines matching* tenant inkubasi bisnis inovasi produk kelautan dan perikanan.



Gambar 15 Pelatihan Digital Marketing dan Monitoring evaluasi UMKM Inkubasi Bisnis Invapro KP

- I. Fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil KP pada triwulan III Tahun 2024 telah dilaksanakan berupa (1) Fasilitasi Pendampingan Teknik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan kepada 45 UMKM penerap PPNT; (2) Bimbingan teknis pengolahan bernilai tambah bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dengan penyelenggara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur, pelatihan yang diberikan antara lain teknologi pengolahan Gohyong Ikan Tuna dan Kue Churos; (3) Bimbingan teknis pelatihan diversifikasi hasil olahan perikanan dengan penyelenggara Dinas Perikanan Kabupaten Bekasi, pelatihan yang diberikan antara lain pengolahan kaki naga dan keong mas berbahan baku ikan; (4) Pengujian laboratorium produk UMKM; dan (5) Rekapitulasi dan analisis data hasil pengujian laboratorium produk UMKM.



Gambar 16 Fasilitasi pendampingan teknik pengolahan dan pemasaran hasil KP

Sasaran Program 2. Ekonomi Subsektor Pengolahan dan Pemasaran Produk KP Meningkat

2. Nilai Ekspor Hasil Perikanan

Nilai ekspor hasil perikanan adalah jumlah komoditas produk perikanan, baik hidup, segar, dingin, maupun olahan yang dikategorikan dalam kode *Harmonized System* (HS) sebanyak 507 kode HS dalam 8 digit yang dijual ke luar negeri yang dikonversi dalam bentuk uang (US Dollar). Indikator kinerja ini dihitung berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 4 Ikhtisar Pencapaian Nilai Ekspor Hasil Perikanan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW I 2024	TW III 2024	TW II 2024			TW II 2024	TW III 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD Miliar)	5,17	3,34	4,85	7,2	4,23	2,71	3,61	4,23	81,82	58,75	56,09	17,17

*angka sementara s.d Bulan September 2024

Sumber Data: BPS (diolah Ditjen PDSPKP)

Nilai ekspor hasil perikanan Indonesia Triwulan III tahun 2024 mencapai USD 4,23 miliar (angka sementara sampai dengan September). Capaian tersebut setara dengan 81,82 % terhadap target triwulan III tahun 2024 (USD 5,17 miliar) dan 58,75% terhadap target jangka menengah dan target tahun 2024 (USD 7,2 miliar). Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya sebesar USD 2,71 miliar maka capaian ini mengalami peningkatan sebesar 56,09% dan meningkat 17,17% dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebesar USD 3,61 miliar.

Tabel 5 Capaian Ekspor Periode Triwulan III tahun 2023-2024

BULAN	Volume (Ribuan ton)			Nilai (USD Juta)		
	2023	2024*	YoY	2023	2024*	YoY
Januari	92.06	121.73	32.2%	442.59	527.71	19.2%
Februari	86.90	97.63	12.3%	414.99	430.43	3.7%
Maret	105.88	114.76	8.4%	503.20	497.25	-1.2%
April	80.38	86.11	7.1%	382.32	363.67	-4.9%
Mei	102.11	110.84	8.6%	507.21	483.54	-4.7%
Juni	88.24	104.31	18.2%	437.01	413.83	-5.3%
Juli	98.88	117.87	19.2%	448.37	487.88	8.8%
Agustus	106.59	143.06	34.2%	475.45	526.29	10.7%
September	108.32	119.83	10.6%	494.34	503.22	1.8%
TOTAL	869.36	1,016.14	16.9%	4,105.48	4,233.82	3.1%

*) angka sementara

Sumber Data: BPS diolah Ditjen PDSPKP

Pada periode yang sama, ekspor non migas mengalami penurunan sebesar 5,96% dan ekspor Indonesia secara keseluruhan juga mengalami penurunan sebesar 5,80% (BPS, 2024). Nilai ekspor hasil perikanan Triwulan III tahun 2024 berkontribusi sebesar 19,16,00% terhadap nilai ekspor nasional sebesar USD22,06 miliar (angka sementara) atau 20,23% terhadap nilai ekspor non migas Triwulan II tahun 2024 yakni sebesar USD20,91 miliar (BPS, September 2024).

Tabel 6 Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Komoditas Utama Triwulan III Tahun 2024

Komoditas Utama	Volume (Ribuan ton)			Nilai (USD Juta)		
	2023	2024*	YoY	2023	2024*	YoY
Udang	163.90	165.56	1.0%	1,293.90	1,189.51	-8.1%
Tuna-Cakalang-Tongkol	149.17	191.53	28.4%	688.70	743.14	7.9%
Cumi-Sotong-Gurita	96.76	129.53	33.9%	472.07	588.76	24.7%
Rajungan-Kepiting	21.89	30.74	40.4%	336.71	394.48	17.2%
Rumput Laut	191.61	192.89	0.7%	357.68	256.10	-28.4%
Lainnya	246.03	305.90	24.3%	956.42	1,061.84	11.0%
TOTAL	869.36	1,016.14	16.9%	4,105.48	4,233.82	3.1%

*angka sementara s.d Bulan September 2024

Sumber Data: BPS diolah Ditjen PDSPKP

Tabel 6 menunjukkan Komoditas utama ekspor pada periode Januari-September 2024 meliputi Udang sebesar USD 1,18 miliar (28,1% terhadap total ekspor Indonesia), Tuna- Cakalang-Tongkol (TCT) USD 743,14 juta (17,5%), Cumi-

Sotong-Gurita (CSG) USD 588,76 juta (13,9%), Rajungan-Kepiting USD 394,48 Juta (9,3%) dan Rumput Laut USD 256,10 Juta (6,1%). Penurunan ekspor terjadi pada komoditas udang dan rumput laut, sedangkan ekspor TCT, CSG dan Rajungan-Kepiting mengalami peningkatan.

Pasar utama udang adalah AS sebesar USD 757,81 Juta (63,7% dari total ekspor udang Indonesia), diikuti oleh Jepang USD 213,621 Juta (18,0%), Tiongkok USD 62,50 Juta (5,3%), Uni Eropa USD 36,82 Juta (3,1%) dan ASEAN USD 31,10 Juta (2,6%). Nilai ekspor udang Indonesia pada Januari-September 2024 mengalami penurunan sebesar USD 104,38 juta atau 8,07% dibanding tahun 2023.

Pasar utama TCT meliputi AS sebesar USD 169,79 Juta (22,8% dari total ekspor TCT Indonesia), ASEAN USD 154,28 Juta (20,8%), Uni Eropa USD 115,20 Juta (15,5%), Jepang USD 106,76 Juta (14,4%), dan Timur Tengah USD 93,82 Juta (12,6%). Nilai ekspor komoditas TCT Indonesia pada Januari-September 2024 mengalami peningkatan sebesar USD 54,44 juta atau 7,90% dibanding tahun 2023.

Pasar utama CSG meliputi Tiongkok sebesar USD 271,57 juta (46,1% dari total ekspor CSG Indonesia), ASEAN USD 156,75 Juta (26,6%), Uni Eropa USD 55,94 Juta (9,5%), Taiwan USD 31,33 Juta (5,3%), Amerika Serikat USD 22,87 Juta (3,9%) dan Jepang USD 16,53 Juta (2,8%). Nilai ekspor CSG Indonesia pada Januari-September 2024 mengalami peningkatan sebesar USD 116,67 Juta atau 24,7% dibanding tahun 2023.

Pasar utama Rajungan-Kepiting meliputi Amerika Serikat sebesar USD 259,45 Juta (65,8% dari total ekspor Rajungan-Kepiting Indonesia), Tiongkok sebesar USD 63,26 Juta (16,0%), ASEAN sebesar USD 31,19 Juta (7,9%), Jepang sebesar USD 11,35 Juta (2,9%), dan Uni Eropa sebesar USD 10,95 Juta (2,8%). Nilai ekspor Rajungan-Kepiting Indonesia pada Januari-September mengalami peningkatan sebesar USD 57,77 juta atau 17,16% dibanding tahun 2023.

Pasar utama Rumput Laut Laut meliputi Tiongkok sebesar USD 173,86 Juta (67,9% dari total ekspor Rumput Laut Indonesia), Uni Eropa sebesar USD 23,98 Juta

(9,4%), ASEAN sebesar USD 11,23 Juta (4,4%), Jepang sebesar USD 8,10 Juta (3,2%), dan Amerika Serikat sebesar USD 7,88 Juta (3,1%). Nilai ekspor komoditas Rumput laut Indonesia pada Januari-September 2024 mengalami penurunan sebesar USD 101,58 juta atau 28,40% dibanding tahun 2023.

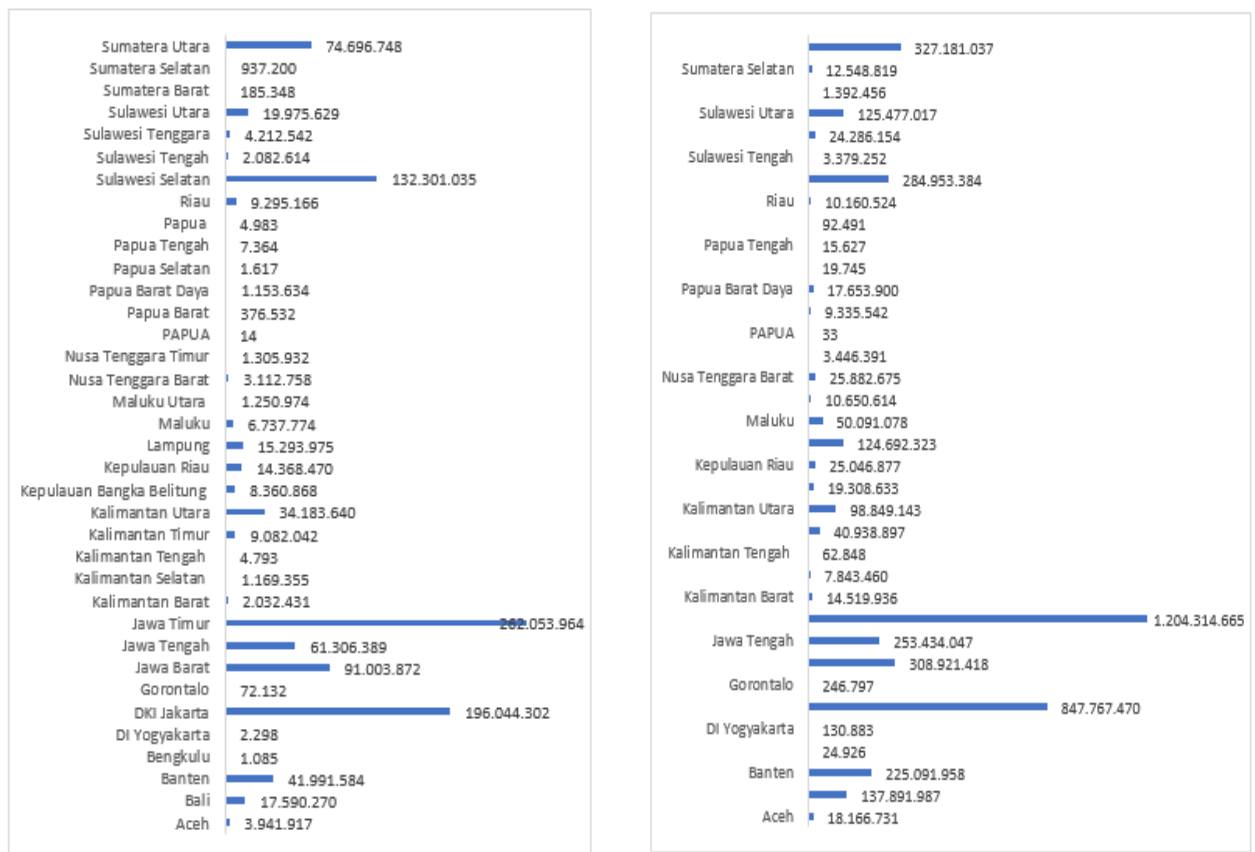
Berdasarkan negara tujuan sebagaimana Tabel 7, pada periode Januari – September 2024, negara tujuan ekspor utama yaitu: Amerika Serikat (AS) dengan nilai USD 1,38 miliar (32,6% dari total ekspor produk perikanan Indonesia), diikuti oleh Tiongkok USD 853,50 juta (20,2%), ASEAN USD 569,75 juta (13,5%), Jepang USD 438,94 juta (10,4%), dan Uni Eropa USD 309,41 juta (7,3%). Dari kelima negara tersebut hanya tujuan ekspor ke Tiongkok, ASEAN dan Uni Eropa yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 7 Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Negara Tujuan Ekspor Triwulan III Tahun 2024

Negara Tujuan	Volume (Ribuan ton)			Nilai (USD Juta)		
	2023	2024*	YoY	2023	2024*	YoY
Amerika Serikat	160.04	158.68	-0.8%	1,427.26	1,379.95	-3.3%
Tiongkok	304.93	356.38	16.9%	791.72	853.50	7.8%
ASEAN	148.29	192.94	30.1%	480.13	569.75	18.7%
Jepang	85.65	92.80	8.3%	520.64	438.94	-15.7%
Uni Eropa	41.50	58.22	40.3%	250.84	309.41	23.3%
Lainnya	128.96	157.12	21.8%	634.89	682.28	7.5%
TOTAL	869.36	1,016.14	16.9%	4,105.48	4,233.82	3.1%

*angka sementara s.d Bulan Juni 2024

Sumber Data: BPS, diolah Ditjen PDSPKP



Gambar 17 Volume dan Nilai Ekspor Produk Perikanan Berdasarkan Provinsi Asal Triwulan III Tahun 2024

Gambar 17 diketahui bahwa terdapat tiga provinsi yang memberikan kontribusi nilai maupun volume ekspor hasil perikanan terbesar yaitu (1) Provinsi Jawa Timur dengan kontribusi sebesar 1,2 USD Miliar (28,45%), (2) Provinsi DKI Jakarta dengan kontribusi sebesar 0,85 USD miliar (20,02%), dan Provinsi Sulawesi Selatan dengan kontribusi sebesar 0,28 USD miliar (6,73%).

Beberapa faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya target nilai ekspor hasil perikanan Triwulan III tahun 2024 antara lain :

- a. Perlambatan ekonomi di negara tujuan ekspor produk perikanan yang terjadi di beberapa negara tujuan utama ekspor perikanan Indonesia, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang, memberikan dampak negatif terhadap daya beli konsumen. Penurunan permintaan produk perikanan akibat menurunnya

pendapatan masyarakat di negara-negara tersebut memengaruhi volume ekspor, khususnya pada komoditas udang dan ikan olahan.

- b. Kondisi geopolitik dan konflik di Timur Tengah yang mempengaruhi rantai pasokan dan distribusi komoditas perikanan. Konflik ini tidak hanya mengganggu jalur pengiriman, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam pasar komoditas global, menyebabkan fluktuasi harga bahan baku dan produk jadi yang menekan daya saing ekspor Indonesia.
- c. Optimalisasi kapasitas pasokan produksi dan pemenuhan kualitas bahan baku ekspor yang tidak konsisten dan belum sepenuhnya memenuhi standar internasional membatasi kemampuan untuk menembus pasar-pasar utama.
- d. Diversifikasi pasar dan produk ekspor belum optimal, dimana adanya ketergantungan pada beberapa pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa membuat ekspor rentan terhadap kebijakan perdagangan dan perubahan ekonomi di negara-negara tersebut. Selain itu, upaya diversifikasi produk yang lebih inovatif dan bernilai tambah belum maksimal, membatasi potensi pertumbuhan di pasar baru.
- e. Hambatan ekspor di negara tujuan baik tarif maupun non-tarif (SPS dan TBT), terutama terkait Standar Sanitasi dan Fitosanitasi (SPS) dan Hambatan Teknis Perdagangan (TBT), terus menjadi tantangan. Beberapa negara tujuan ekspor, seperti Uni Eropa, Rusia, Arab Saudi, dan Brazil, telah memberlakukan regulasi yang ketat terkait registrasi eksportir. Proses ini memperlambat akses Indonesia ke pasar tersebut dan mengurangi jumlah eksportir terdaftar.
- f. Mulai diberlakukannya pengenaan tarif anti-dumping yang signifikan, mengurangi daya saing produk udang Indonesia di pasar AS dan mempengaruhi volume ekspor secara keseluruhan.

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan capaian nilai ekspor hasil perikanan periode ke depan, antara lain:

- a. Melakukan koordinasi tindak lanjut atas penyelesaian perundingan dan penyelesaian hambatan ekspor lainnya;
- b. Melakukan koordinasi penyelesaian hambatan ekspor udang ke Amerika Serikat atas tuduhan CVD dan *Anti-dumping*.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Ekspor Hasil Perikanan sebesar Rp12.600.000.000,- sampai dengan periode Triwulan III tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp7.795.656.000 atau setara dengan 61,87%.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini yang juga sekaligus sebagai bentuk tindak lanjut rekomendasi atas permasalahan di Triwulan III Tahun 2024, antara lain:

- a. Pengembangan/Pengelolaan Sistem Bursa Pasar Ikan;

Pada triwulan III 2024, telah dilaksanakan beberapa pertemuan koordinasi antara pengembang aplikasi, Pusdatin KKP, dan tim Direktorat Pemasaran untuk memperbaiki error dan mengupdate jenis ikan yang ada dalam website. Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, error pada saat proses login terjadi karena adanya pembaharuan pada sistem server KKP sehingga memengaruhi website Bursa Ikan, dan telah ditindaklanjuti perbaikannya

Selanjutnya, dilakukan sosialisasi kepada pelaku usaha di beberapa lokasi antara lain Kota Tangerang Provinsi Banten pada tanggal 13 s.d 14 Agustus 2024, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 20 Agustus 2024, dan Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2024. Pada kegiatan sosialisasi tersebut disampaikan pengenalan sistem informasi bursa pasar ikan yang dapat diakses pada laman <https://bursaikan.kkp.go.id/id>, pembuatan akun pengguna dan pendampingan bagi pelaku usaha yang belum memiliki KUSUKA, serta pendampingan dalam memasang iklan produk UMKM kelautan dan perikanan.



Gambar 18 koordinasi antara pengembang aplikasi bursa ikan

b. Pelaksanaan Forum Perluasan Akses Pasar Negara Tujuan Ekspor melalui serangkaian kegiatan :

- 1) Melakukan finalisasi *Operational Procedure* Protokol Perubahan *Indonesia Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Indonesia dan Jepang telah menyelesaikan perundingan Protokol Perubahan IJEPA melalui penandatanganan naskah perjanjian oleh Menteri Perdagangan RI dengan Menteri Luar Negeri Jepang pada tanggal 8 Agustus 2024 secara virtual. Hasil perundingan IJEPA tersebut telah mengakomodasi kepentingan Indonesia khususnya pembebasan 4 pos tarif produk olahan tuna dan cakalang asal Indonesia dimana 2 (dua) produk (HS 1604.14.091 dan HS 1604.14.099) dengan persyaratan tambahan ukuran panjang bahan baku cakalang tidak kurang dari 30 cm. KKP dan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) Jepang telah melakukan finalisasi *Operational Procedure* terkait dengan persyaratan panjang bahan baku cakalang tersebut dalam bentuk sertifikat barang. Selain 4 (empat) pos tarif olahan tuna, Indonesia juga mendapatkan pembebasan tarif 0% sebanyak 67 pos tarif produk perikanan antara lain yellowfin tuna beku, fillet tilapia segar, fillet swordfish beku, kekerangan, olahan lobster, dan rajungan beku. Kesepakatan Protokol Perubahan IJEPA akan mulai berlaku saat perjanjian diimplementasikan setelah melalui proses ratifikasi di parlemen kedua negara dan diharapkan akan berlaku efektif tahun 2025.

- 2) Melaksanakan penanganan hambatan ekspor melalui serangkaian pertemuan dengan *US Department of Commerce* (USDOC) dan berbagai pihak terkait (*Lawyer, National Fisheries Institute*, dan Importir udang Indonesia) di Washington DC pada tanggal 19 s.d 22 Agustus 2024 dalam rangka penanganan kasus Anti-Dumping (AD) Udang Beku asal Indonesia. Tujuan utama (*high call position*) penanganan AD pada tahap *final determination* USDOC adalah Indonesia mendapatkan nilai de-minimis (dumping margin dibawah 2%) sehingga tidak dikenakan bea masuk AD, atau USITC menetapkan tidak ada kerugian industri udang AS sebagaimana dituduhkan oleh petitioner.



Gambar 19 serangkaian pertemuan dengan US Department of Commerce (USDOC) dan pihak terkait lainnya di Washington D.C

- c. Penyusunan Profil Ekspor hasil kelautan dan perikanan pada tahun 2024 meliputi Profil Pasar udang, Profil pasar Tuna, Profil Pasar Tilapia dan Profil Pasar Rumput Laut. Pada triwulan III tahun 2024 telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain:
 - 1) Melaksanakan Finalisasi *Booklet* Bilingual Profil Pasar Luar Negeri pada tanggal 11 Juli 2024 untuk komoditas prioritas (udang, tilapia, rumput laut, lobster, dan kepiting) tahun 2023 versi dua bahasa (bilingual) sebagai dukungan pameran *Indo Fisheries 2024*.
 - 2) Melaksanakan pembahasan untuk profil pasar luar negeri komoditas rumput laut pada tanggal 2 Agustus 2024 dalam rangka melengkapi data terkait produksi, pangsa, harga karaginan dan agar serta eksportir utama rumput

laut.

- 3) Melaksanakan diseminasi Profil Pasar Luar Negeri Komoditas Tilapia & Sosialisasi *Market Intelligence* Ditjen PDSPKP kepada pelaku usaha pada tanggal 19 September 2024 melalui pelaksanaan FGD, pertukaran informasi terkait profil pasar luar negeri untuk komoditas tilapia, strategi penguatan produksi tilapia dan pengembangan hilirisasi industri tilapia serta sosialisasi aplikasi market intelligence disampaikan ke pelaku usaha
 - 4) Mengikuti kunjungan kerja MKP ke Rusia pada 17 s.d 21 September 2024, dimana delegasi KKP menindaklanjuti akselerasi penyelesaian MoU tentang Perikanan dan Budidaya antara RI dan Rusia, serta *Mutual Recognition Arrangement* antara KKP dan *Federal Service of Veterinary and Phytosanitary Surveillance* mengenai jaminan kualitas, keamanan, dan kesehatan produk ikan dan perikanan impor dan ekspor.
- d. Penyusunan Rekomendasi kebijakan pendampingan *major project* pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan pasar ikan bertaraf internasional sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan hasil pemantauan dan koordinasi monitoring evaluasi kegiatan PHLN, kegiatan Integrated Fishing Ports and International Fish Market -Phase II Preparation Project dari ADB, masuk dalam kategori pinjaman yang sudah efektif namun belum ada penarikan (Zero Disbursement). Dan kegiatan Integrated Fishing Ports and International Fish Market -Phase I dari ISDB masuk dalam kategori pinjaman yang mengalami keterlambatan penarikan.

- e. Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional melalui pameran Indo Fisheries 2024 Expo & Forum yang dilaksanakan di triwulan III. Indo Fisheries 2024 Expo & Forum diselenggarakan oleh KKP (sebagai host) berkolaborasi dengan PT. Napindo Media Ashatama (sebagai organizer) pada tanggal 17 s.d 19 Juli 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta. Pada pameran ini, KKP memfasilitasi paviliun seluas 126 m2 untuk empat brand produk perikanan Indonesia yaitu Indonesian Tuna, Indonesian Shrimp, Indonesian Pangasius, dan *Indonesian Seaweed*, serta 6 (enam) pelaku usaha siap ekspor. KKP juga membuka pelayanan informasi kebijakan KKP. Capaian nilai potensi transaksi selama 3 (tiga) hari pameran berlangsung sebesar Rp 151,75 miliar untuk keseluruhan pameran Indo Fisheries 2024 dengan komoditas yang diminati yaitu agar, karaginan, fillet kakap merah, fillet kerapu, udang, *fillet sweetlips*, cumi, *fishmaw*, bandeng, tuna, permesinan, pakan dan obat-obatan. Potensial buyer berasal dari Indonesia, Korea, Vietnam, Malaysia, China, dan Singapura.



Gambar 20 Indo Fisheries 2024 Expo & Forum

3. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan adalah jenis dan jumlah ikan yang dikonsumsi seseorang, kelompok, atau penduduk untuk memenuhi kebutuhan gizi. Ikan mencakup ikan segar dan olahan sesuai dengan kuesioner Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dari BPS. Penghitungan konsumsi ikan nasional merupakan angka konsumsi ikan per

kapita (secara utuh segar) dari seluruh provinsi dibagi jumlah provinsi pada periode satu tahun.

Tabel 8 Ikhtisar Pencapaian Konsumsi Ikan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW I 2024	TW III 2023	s.d TW III 2024			TW II 2024	TW III 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Konsumsi Ikan (setara utuh segar) (kg/kapita)	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	-	-

*Angka sementara

Konsumsi ikan tahun 2024 ditargetkan sebesar 59,00 kg/kapita/tahun. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan II tahun 2024 serta belum dapat dibandingkan baik dengan target tahunan dan capaian triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja konsumsi Ikan dan perikanan sebesar Rp53.898.377.000,- sampai dengan periode Triwulan III tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp35.232.273.000,00 atau setara dengan 66,37%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen PDSPKP dalam rangka pencapaian indikator kinerja konsumsi ikan antara lain:

- a. Penyusunan profil dalam negeri kelautan perikanan dilakukan melalui kegiatan antara lain :
 - 1) Penyusunan buku pedoman penghitungan angka konsumsi ikan, baik angka konsumsi ikan tahun 2023 maupun angka konsumsi ikan periode bulanan tahun 2024. Buku pedoman AKI Tahun 2023 menyampaikan panduan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menghitung AKI nasional, provinsi dan kabupaten/kota tahun 2023. Adapun buku pedoman AKI Periode Bulanan Tahun 2024 menyampaikan panduan bagi petugas pengolah data dalam

menentukan sampel wilayah dan rumah tangga, metode pendataan, entri data, serta verifikasi dan validasi data AKI periode bulanan tahun 2024.

- 2) Penyusunan buku peta konsumsi dan serapan ikan berdasarkan preferensi konsumen rumah tangga tahun 2023. Buku peta tahun 2023 menyampaikan data konsumsi dan serapan ikan berdasarkan 15 jenis ikan dengan preferensi tertinggi di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.



Gambar 21. Penyusunan Buku Konsumsi dan Serapan Ikan

- 3) Koordinasi dan pendampingan penghitungan AKI di wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi. Kegiatan dilaksanakan dengan penjelasan metode penghitungan AKI tahunan dan/atau AKI periode bulanan, asistensi penghitungan AKI Tahunan dan/atau AKI periode bulanan pada periode triwulan III di Papua Barat, Kalimantan Selatan, Papua, Halmahera Timur dan Lampung.
- 4) Pelaksanaan finalisasi data AKI Nasional tahun 2023 pada tanggal 13 Agustus 2024 dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan di 34 Provinsi. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, Capaian AKI Nasional tahun 2023 sebesar 57,91 Kg/Kapita/Tahun setara utuh segar atau mencapai 100,53% dari target AKI Nasional tahun 2023 sebesar 57,61 Kg/Kapita/Tahun setara utuh segar. Capaian serapan total tahun 2023 sebesar 13,05 juta ton setara utuh segar dengan preferensi konsumen berdasarkan 5 (lima) jenis ikan

tertinggi antara lain: tongkol 8,05%, kembung 6,30%, cakalang 6,17%, nila 6,10%, dan lele 5,13%.



Gambar 22 Finalisasi data AKI

- 5) Validasi data AKI Periode bulan Januari-Juli tahun 2024. Berdasarkan hasil validasi, masih terdapat enumerator yang belum melakukan entri data serta masih terdapat data yang dinyatakan tidak valid. Data tidak valid karena ada kolom data yang tidak lengkap, data yang dientri tidak wajar (terlalu kecil atau terlalu besar). Setelah dikonfirmasi, data tidak wajar tersebut karena adanya salah persepsi enumerator dalam melakukan entri data ke tools nenggeulis. Enumerator selanjutnya memperbaiki data tersebut dan akan divalidasi kembali oleh provinsi dan pusat.
- b. Pelaksanaan kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kandungan gizi ikan bagi kesehatan, meningkatkan minat masyarakat untuk mengonsumsi ikan, mendukung program prioritas nasional percepatan penurunan stunting dan gizi buruk, mempromosikan produk perikanan sebagai makanan kaya gizi dan protein serta menyerap produksi ikan/olahan ikan pada UMKM setempat serta pemenuhan gizi masyarakat. Selain itu pada kegiatan gemarikan dilakukan distribusi paket gemarikan dengan tujuan untuk mengenalkan ragam produk olahan ikan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat dalam tingkatan semua usia dan mengenalkan produk UMKM dan menjadi sumber pendapatan untuk UMKM setempat. Pada periode triwulan III

sebanyak 72 kegiatan promosi yang terdiri dari 66 promosi kegiatan Perluasan Safari Gemarikan, 3 promosi dari kegiatan Bazar dan 3 promosi pada media sosial gemarikan. 66 promosi kegiatan perluasan gemarikan dilaksanakan di OKI, Kab. kupang, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Madiun, Nganjuk, Jombang Ponorogo Kota Kupang, Kab Kupang, Kab Timor Tengah Selatan, Madiun, Kab. Kebumen, Kab. Banjarnegara, Kab. Purbalingga, Kab. Karo, Kab. Nagakeo, Kab. Ngada, Lampung Selatan, Bantaeng, Tulangbawang, Cilacap, Kab. Kepulauan Sula, Purworejo, Magelang, Temanggung, Kota Samarinda, Kota Jambi , Kab. Jambi, Garut, Palopo, Blitar, Pati, Rembang

Gambar 21 Pelaksanaan kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) di Kab. Nganjuk dan Madiun,

- c. Pelaksanaan Promosi Produk Kelautan dan Perikanan di Dalam Negeri melalui pelaksanaan Kampanye Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI/BBWI) di Provinsi Maluku pada tanggal 23 s.d 24 Agustus 2024 di Lapangan Merdeka, Ambon yang mengusung tema "Maluku Mendunia!", dengan pesan semangat dalam mengangkat potensi Maluku Mendunia dengan potensi kekayaan alam dan pariwisata antara lain Tuna Indonesia, rempah-rempah, destinasi wisata, kerajinan, seni budaya dan musik. Rangkaian kegiatan antara lain acara pesta rakyat yang mengangkat budaya lokal, seremonial bersama pimpinan K/L dan daerah, pameran dan bazar UMKM unggulan, pameran potensi wisata Maluku, 5 (lima) sesi *talkshow*, apresiasi, *entertainment* serta berbagai kegiatan lainnya. Acara bazar melibatkan 104 UKM hasil kurasi yang terbagi dalam 4 klaster, yaitu: Pangan/Kuliner, Kerajinan, Herbal/Kecantikan dan Fashion. Kegiatan dihadiri oleh Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenkomarves, Penjabat Gubernur Maluku, Para Bupati dan Walikota se-Provinsi Maluku, Pejabat lingkup K/L, Pejabat lingkup KKP dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Ketua Dekranasda Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku, mitra *Top Brands* dan pelaku UMKM. Pada

kegiatan ini dilakukan penyerahan apresiasi kepada: (1) 6 UMKM perwakilan penerima SKP, (2) 3 UMKM dengan kategori transaksi tertinggi, (3) 3 UMKM dengan kategori produk ramah lingkungan (4) 5 UMKM dengan kategori *socialpreneur, rising star*, inspiratif, inovatif dan *Go Digital*, (5) 3 UMKM penerima Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Adapun Total transaksi penjualan produk-produk UMKM selama 2 (dua) hari pelaksanaan Bazar UMKM mencapai Rp. 236.169.000,-.



Gambar 23 Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (Gernas BBI/BBWI)

- d. Pembangunan sentra kuliner ikan. Sentra kuliner merupakan bantuan Pemerintah berupa bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pemasaran kuliner dan pusat oleh-oleh berbahan baku ikan. Pembangunan sentra kuliner tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 19 tahun 2024 tentang Calon Lokasi Kampung Nelayan Modern (1) Desa Setono, Kota Pekalongan (2) Desa Lateng, Kabupaten Banyuwangi (3) Desa Bulumeduro, Kabupaten Tuban (4) Desa Pasarbanggi, Kabupaten Rembang (5) Desa Ciwaru, Kabupaten Sukabumi (6) Desa Cikiruhwetan, Kabupaten Pandeglang (7) Desa Warloka Pesisir, Kabupaten Manggarai Barat (8) Desa Sorue Jaya, Kabupaten Konawe (9) Desa Kuala Raja, Kabupaten Bireuen (10) Desa Ekas Buana, Kabupaten Lombok Timur. Sampai dengan periode triwulan II Ditjen PDSPKP telah melakukan kegiatan pendampingan dalam rangka identifikasi dan *feasibility* mendukung program penataan kampung nelayan modern. Berdasarkan hasil reviu, evaluasi, penilaian

kesiapan serta kesiapan operasionalisasi yang meliputi penilaian aspek sosial untuk tahun anggaran 2024 pelaksanaan pemabngunan KALAMO sebagai modelling/percontohan hanya akan akan dilaksanakan di Desa Lateng Kabupaten Banyuwangi untuk KALAMO dengan pendekatan Sentra Kuliner Seafood. Ditjen PDSPKP telah melaksanakan Verifikasi lapangan dan koordinasi perencanaan yang dilaksanakan di Banyuwangi pada tanggal 19 s.d 21 Juni 2024. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi, calon lokasi pembangunan Senkul Ikan merupakan kawasan pengembangan wisata dan kuliner yang merupakan tanah milik pemda seluas $\pm 12.000 \text{ m}^2$ dengan 1 sertifikat Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Terdapat 2 Kelompok Usaha Bersama (KUB) yaitu KUB Pantai Ancol dan KUB Teluk Mandar yang sudah ada di area calon senkul dengan anggota kelompok pedagang sebanyak 65 pedagang. Selanjutnya pada triwulan III dilakukan pengusulan revisi kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk perubahan jumlah unit dan biaya pembangunan sentra kuliner, namun pengajuan dimaksud tidak disetujui karena adanya perubahan jumlah output prioritas nasional berdasarkan surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-459/AG/AG.3/2024 tanggal 2 Agustus 2024. Berdasarkan hal tersebut Ditjen PDSPKP melaksanakan Verifikasi lapangan di beberapa lokasi antara lain Cirebon, Jepara, Trenggalek, Sleman dan Semarang (Universitas Diponegoro).

- e. Pembinaan Lembaga Pengelola Pasar Ikan untuk memberikan pembinaan kepada pembina pasar (Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang terlibat dalam pembinaan pedagang ikan dan/atau pengelola pasar ikan), pengelola pasar dan pedagang dalam rangka mewujudkan pasar ikan yang sehat, bersih, aman dan nyaman serta memenuhi kaidah sanitasi dan higienis. Pembinaan dapat dilakukan melalui kunjungan langsung, pertemuan dengan pembina pasar, pedagang dan pengelola pasar atau menyampaikan melalui media sosialisasi yaitu poster, video, dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan dengan sosialisasi dan pembinaan dalam rangka penerapan SOP menuju pasar ikan yang memenuhi

standar, antara lain: SOP pengelolaan pasar, SOP cara berjualan ikan yang baik, SOP kesehatan dan kebersihan pribadi pelaku pasar, serta pedagang ikan, SOP pembersihan dan sanitasi tempat berjualan ikan, SOP pengelolaan limbah/sampah, SOP pembongkaran ikan segar di area pasar ikan, SOP cara memajang (display) ikan segar dan SOP penyimpanan ikan. Pada periode triwulan III pembinaan lembaga pengelola pasar dilaksanakan pada 30 lembaga yaitu (1) Pasar Bahagia Kubu Raya, (2) Pasar Plamboyan Pontianak, (3) Pasar Kemuning Pontianak, (4) Pasar Dramaga Kab. Bogor, (5) Pasar Gunung Batu Kab. Bogor, (6) Pasar Tanah Baru Bogor, (7) Pasar Basah Modern Marakas Bekasi (8) Pasar Babelan Bekasi, (9) Pasar Harapan Bekasi, (10) Pasar Depok Jaya, (11) Pasar Bersih Sentul, (12) Pasar Ikan Bersih Wameo (13) Pasar Ikan Bersih Laino, (14) Pasar Ikan Lelong Makasar, (15) Pasar Ikan Bersih Sula, (16) Pasar Kramat Cirebon, (17) Pasar Kanoman Cirebon, (18) Pasar Ikan Fandoi Biak Numfor, (19) Pasar Leuwi Panjang Bandung, (20) Pasar Anyar Bandung, (21) Pasar Induk Caringin Bandung, (22) Pasar Pasundan Sukabumi, (23) Pasar Lettu Bakri Sukabumi, (24) Pasar Pelita Sukabumi, (25) Pasar Bantul DIY, (26) Pasar Niten DIY, (27) Pasar Ikan Modern Bandung, (28) Pasar Cikurubuk Tasikmalaya (29) Pasar Cihidiang Tasikmalaya dan (30) Pasar Pabean Surabaya.



Gambar 24 Pembinaan Lembaga Pengelola Pasar Ikan

- f. Pengadaan Peralatan Pemasaran. Peralatan pemasaran merupakan Bantuan Pemerintah langsung kepada masyarakat dalam hal ini koperasi/kelompok perikanan berupa *cool box* guna mendukung distribusi dan pemasaran hasil perikanan. Pada Tahun 2024 Ditjen PDSPKP mengalokasikan sebanyak 6.000 unit sarana pemasaran *cool box*. Sampai dengan periode triwulan III tahun 2024 Ditjen PDSPKP telah telah mengirimkan bantuan pemerintah tahap I berupa peralatan pemasaran *coolbox* kapasitas 100 dan 120 liter sebanyak 2088 unit kepada 117 kelompok pelaku usaha kelautan dan perikanan di 31 kabupaten/kota seluruh Indonesia oleh penyedia PT. Arafah dan PT. Surya Dinamis Nusantara Jaya.



Gambar 25 Penyerahan bantuan pemerintah berupa peralatan pemasaran di Kab. Cilacap dan Kab. Wonosobo

Sasaran Program 3. Terwujudnya pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel, dan Berkelanjutan

4. Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan

Investasi di sektor kelautan dan perikanan (KP) didefinisikan sebagai tindakan penanaman modal usaha di sektor KP dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Realisasi investasi kelautan dan perikanan merupakan realisasi investasi usaha perikanan (penangkapan dan budidaya), pengolahan dan perdagangan/pemasaran. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) terus berupaya mendorong peningkatan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai

kegiatan strategis, antara lain: penyediaan informasi peluang investasi, promosi investasi, pendampingan investasi, pemantauan dan pengendalian investasi. Kegiatan promosi usaha dan investasi dalam rangka mendukung program prioritas KKP, diantaranya yaitu Kampung Budidaya, peningkatan produksi komoditas unggulan, dan Penangkapan Ikan Terukur, serta mendukung peningkatan nilai ekspor hasil perikanan dalam rangka penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Realisasi investasi KP dihitung melalui penjumlahan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bersumber dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Kredit Investasi yang bersumber dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Investasi yang berasal dari PMA dan PMDN merupakan kontribusi perusahaan swasta, baik dalam negeri maupun asing terhadap pembangunan kelautan dan perikanan. Sedangkan investasi dari kredit investasi merupakan kredit jangka menengah/panjang yang berasal dari Lembaga Keuangan (perbankan dan non perbankan). Realisasi dari kredit investasi mengakomodir investasi masyarakat yang berasal dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

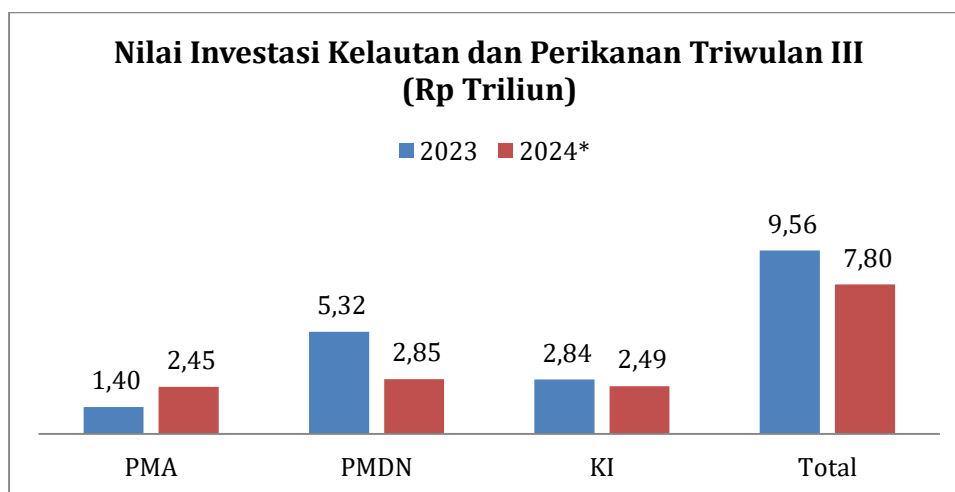
Dalam rangka mencapai target tersebut, Ditjen PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan realisasi investasi sektor kelautan dan perikanan melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain penyediaan informasi peluang investasi, promosi investasi, pendampingan investasi, pemantauan dan pengendalian investasi. Kegiatan promosi usaha dan investasi dalam rangka mendukung program prioritas KKP yaitu Kampung Budidaya, peningkatan produksi udang, dan Penangkapan Ikan Terukur sebagai upaya penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk mendukung program peningkatan nilai ekspor hasil perikanan.

Tabel 9 Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d TW III 2024			TW II 2024	TW III 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan (Rp. Triliun)	6,8	4,5	4,88	9	7,8	5,15	6,51	7,8	114,71	86,67	51,46	19,82

*angka prognosa

Realisasi investasi KP pada triwulan III tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp7,8 triliun, yakni tercapai 114,71% jika dibandingkan dengan target triwulan III tahun 2024 yang sebesar Rp6,8 triliun, atau mencapai 86,67% jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yakni Rp9,00 triliun. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya sebesar Rp5,15 triliun maka capaian ini mengalami peningkatan sebesar 51,46% dan 19,82% dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp6,51 triliun.



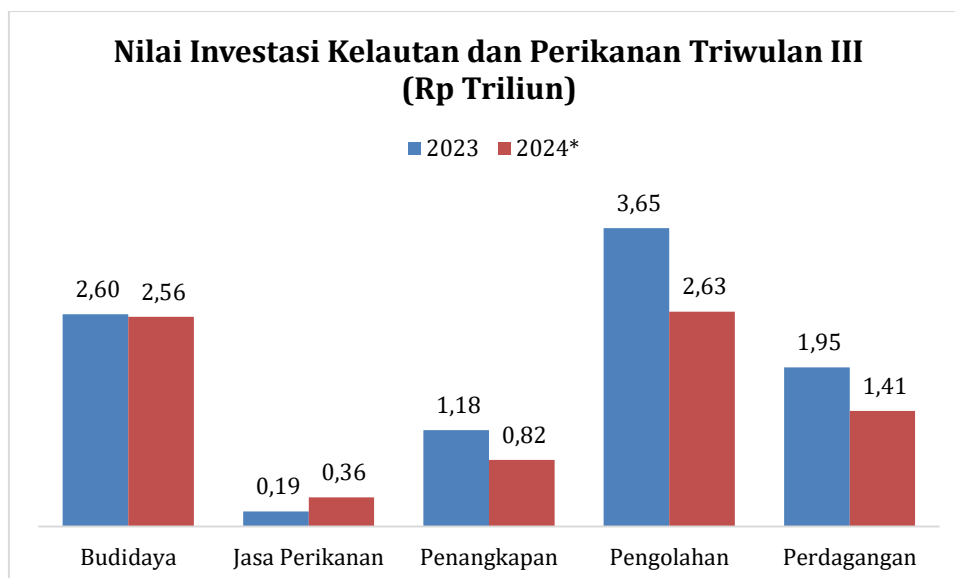
*angka prognosa

Gambar 26 Capaian Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Sumber Permodalan Periode Triwulan III Tahun 2023-2024 (Rp Triliun)

Realisasi investasi yang bersumber dari PMA dan PMDN pada triwulan III tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp5,31 triliun atau melambat 20,98% dibandingkan

periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp6,72 triliun. Realisasi Kredit Investasi pada triwulan III tahun 2024 diperkirakan sebesar Rp2,49 triliun atau melambat 12,42% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp2,84 triliun.

Realisasi investasi bidang pengolahan pada triwulan III tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp2,63 triliun atau melambat 27,95% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp3,65 triliun. Disusul bidang budidaya diperkirakan mencapai Rp2,56 triliun atau melambat 1,24% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp2,60 triliun. Perdagangan diperkirakan mencapai Rp1,41 triliun atau melambat 27,35% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp1,95 triliun. Bidang penangkapan diperkirakan mencapai Rp0,82 triliun atau melambat sebesar 30,95% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp1,18 triliun. Adapun bidang jasa perikanan diperkirakan mencapai Rp0,36 triliun atau meningkat sebesar 89,47% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 sebesar Rp0,19 triliun.



Gambar 27 Capaian Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Bidang Usaha Periode Triwulan III Tahun 2023-2024 (Rp Triliun)

Hongkong (54%), R.R. Tiongkok (12%), Malaysia (11%) adalah TOP 3 asal negara investor di Indonesia pada periode triwulan II Tahun 2024 (periode triwulan III akan dapat ditampilkan pada periode triwulan IV). Sedangkan TOP 3 lokasi tujuan investasi pada periode triwulan II adalah Papua sebesar Rp120,5 miliar disusul Jawa Timur sebesar 31,16 M dan Nusa Tenggara Timur sebesar Rp23,37 miliar.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Investasi Kelautan dan Perikanan sebesar Rp3.383.485.000,- sampai dengan periode Triwulan III tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp2.575.993.000,- atau setara dengan 76,13%.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan realisasi investasi diantaranya:

- a. Penyusunan Dokumen Peluang Investasi yang *Ready to offer* melalui Pemetaan peluang investasi melalui beberapa kegiatan antara lain:
 - 1) Identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang investasi di Kota Tual Provinsi Maluku pada tanggal 15 s.d17 Juli 2024 melalui koordinasi ke beberapa instansi dan *stakeholder* terkait di Provinsi Maluku dan Kota Tual, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Dinas Perikanan Kota Tual, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual, dan PT Samudera Indo Sejahtera (SIS). Kunjungan ke instansi dan *stakeholder* terkait untuk mengidentifikasi potensi sektor kelautan dan perikanan dan mengetahui perkembangan modelling PIT di Zona 3 serta pemetaan peluang investasi kelautan dan perikanan.



Gambar 28 Identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang investasi di Kota Tual Provinsi Maluku

- 2) Kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku pada tanggal 18 Juli 2024 melalui koordinasi dengan beberapa instansi dan stakeholder terkait di Kabupaten Maluku Tenggara, antara lain Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara dan Koperasi Tani Nelayan (Koptanel) Elomel, serta kunjungan ke lokasi modelling rumput laut. Lokasi yang ditawarkan untuk investasi industri rumput laut dan gudang penyimpanan rumput laut adalah milik Koperasi Elomel.



Gambar 29 Kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Maluku Tenggara

- 3) Kegiatan penyampaian laporan penyusunan dokumen peluang investasi industri pengolahan ikan terintegrasi di Kota Tual Provinsi Maluku untuk laporan pendahuluan, pembahasan dan pengayaan data dan informasi awal serta rencana survei lapang dan *benchmarking*. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis 19 September 2024 di Ruang Wisma Gracilaria.



Gambar 30 Kegiatan penyampaian laporan penyusunan dokumen peluang investasi industri pengolahan ikan terintegrasi di Kota Tual

- 4) Survey dan dan FGD Penyusunan Dokumen Peluang Investasi Industri Pengolahan Ikan Terintegrasi di Kota Tual, Provinsi Maluku. Kegiatan survei/kunjungan lapangan dan FGD di Kota Tual, Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 27 September 2024 dengan tujuan observasi kondisi lapangan eksisting, pendampingan survei lapang oleh tim ahli penyusun dokumen peluang investasi, koordinasi dengan Pemerintah Kota Tual terkait penetapan lokasi target investasi, serta sinkronisasi data antar instansi di daerah. Pengumpulan data dilakukan koordinasi ke beberapa instansi dan stakeholder terkait yaitu BAPPEDA Kota Tual, Dinas Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), PLN, PDAM, PT Samudera Indo Sejahtera, CV Adfani Bintang Samudera.



Gambar 31 Survey dan dan FGD Penyusunan Dokumen Peluang Investasi Industri Pengolahan Ikan Terintegrasi di Kota Tual

b. Promosi usaha dan investasi dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:

1) Keikutsertaan pada kegiatan Indo Fisheries Expo & Forum 2024.

Pameran skala internasional Indo Fisheries 2024 Expo & Forum yang diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) pada tanggal 17 s.d 19 Juli 2024. Kegiatan dihadiri 580 peserta dari 40 negara dan kembali mempertemukan berbagai stakeholder untuk saling berbagi informasi mengenai perkembangan sektor kelautan dan perikanan. Pameran yang diadakan termasuk menampilkan 12 paviliun negara-negara besar dunia seperti Belanda, Cina, Eropa, India, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Spanyol, Taiwan, Vietnam, Italia, dan termasuk Indonesia. Pameran ini bersifat *business to business* dan menjadi bagian dari penguatan brand seafood Indonesia.



Gambar 32 Pameran skala internasional Indo Fisheries 2024 Expo & Forum

2) Pendampingan Minat Investasi Komoditas Rumput Laut dengan PT Indorama, PT Krueng Triton Indonesia dengan Thani Invesment dan Abu Dhabi Invesment Company, Yantian District, Tiongkok, Audiensi dan Pendampingan Minat Investasi Komoditas Nila Salin dengan D42 Group, Dubai



Gambar 33 Pendampingan Minat Investasi

5. Kinerja Logistik Hasil Perikanan

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 58 Tahun 2021 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) diamanatkan pada Pasal 13 ayat 3 bahwa monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja SLIN menggunakan kaidah pengukuran secara ilmiah berdasarkan Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI). Penghitungan Indeks Kinerja Logistik Ikan (IKLI) diperlukan untuk mengukur performa dari sistem logistik ikan di suatu koridor yang ditentukan. Angka capaian IKLI berfungsi sebagai sarana evaluasi kinerja sistem logistik ikan yang telah berjalan berdasarkan dimensi pembentuknya. Penghitungan IKLI menggunakan data primer yang bersumber dari hasil wawancara dengan instrumen kuesioner kepada instansi terkait, pelaku jasa logistik dan pelaku usaha perikanan.

Penghitungan IKLI dilakukan dengan mengukur performa atribut berdasarkan persepsi penilaian responden dari lima dimensi pembentuk yaitu :

- Dimensi Pengelolaan Pengadaan Hasil Perikanan : memberikan gambaran tentang ketersediaan data dan informasi untuk perencanaan produksi dan pengadaan ikan sebagai panduan untuk proses distribusi.
- Dimensi Efisiensi : memberikan gambaran tingkat penggunaan sumberdaya (*resource*) dibandingkan dengan output/manfaat yang diperoleh.

- c. Dimensi Konektivitas : memberikan gambaran terkait konektivitas sehingga pelaku logistik mendapatkan kemudahan untuk mendistribusikan barang dan proses logistik menjadi berkembang.
 - d. Dimensi Manfaat : memberikan gambaran bahwa sistem logistik memberikan nilai tambah bagi proses perencanaan dan distribusi ikan, sehingga ekonomi lokal berkembang baik, dan
 - e. Dimensi Tata Kelola : memberikan gambaran terhadap pengaruh kunci penggerak utama Sistem Logistik Ikan Nasional (SISLOGNAS) terhadap komponen Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN).
- b) Saat ini, penghitungan IKLI berdasarkan pada moda transportasi laut. Koridor logistik ditentukan dengan mempertimbangkan komoditas penentu, wilayah atau kawasan serta konektivitas antar wilayah. Penilaian IKLI tahun 2024 dilakukan pada 7 koridor logistik, yaitu:
1. Bitung – Surabaya/Jakarta
 2. Kupang – Surabaya/Jakarta
 3. Kendari – Surabaya/Jakarta
 4. Mimika – Surabaya/Jakarta
 5. Ambon – Surabaya/Jakarta
 6. Makassar – Surabaya/Jakarta
 7. Biak – Surabaya

Tabel 10 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Logistik Hasil Perikanan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW I 2024	TW III 2023	s.d TW III 2024			TW II 2024	TW III 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kinerja Logistik Hasil Perikanan (Indeks)	71,9	71,9	-	71,9	74,72	71,19	-	74,72	103,92	100,00	3,92	-

Kinerja Logistik Hasil Perikanan pada tahun 2024 triwulan III mencapai 74,72. Capaian dimaksud setara dengan 103,92% terhadap target triwulan III tahun 2024 dan target tahun 2024 sebesar 71,9. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya sebesar 71,9 maka capaian ini mengalami peningkatan sebesar 3,92%. Pada tahun 2023 indikator ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil agregasi Kinerja Logistik Hasil Perikanan yang diperoleh sebesar 74,72 menunjukkan bahwa yang memiliki indeks kinerja tertinggi yaitu koridor Kendari– Surabaya/Jakarta dengan indeks sebesar 77,37, sedangkan koridor dengan indeks kinerja terendah yaitu pada koridor Biak sebesar 72,22.

Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pencapaian indikator kinerja Kinerja Logistik Hasil Perikanan sebesar semula Rp45.921.100.000,-, sampai dengan periode Triwulan III tahun 2024 telah direalisasikan sebesar Rp5.552.597.000,- atau setara dengan 12,09%.

Kegiatan yang telah dilaksanakan Ditjen PDSPKP dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Logistik Hasil Perikanan (IKLI) selama triwulan III tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Implementasi Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional (STELINA) dilakukan untuk menjamin ketertelusuran Hasil Perikanan dalam rangka penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan. Dalam rangka mendukung kegiatan ini dilakukan juga kegiatan sistem pengelolaan gudang beku dan layanan ijin usaha jasa pasca panen. Pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha KP untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya dibidang jasa pasca panen penangkapan ikan di laut dan perairan darat, sehingga mendapatkan legalitas perijinan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Pada periode triwulan III telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain :

- 1) Pembahasan draft perubahan Permen KP No 29 tahun 2021 tentang Sistem Ketertelusuran dan Logistik Ikan Nasional yang dilaksanakan pada 1 s.d 2 Juli 2024 di Bogor (pembahasan ketiga di lingkup KKP) dan pada tanggal 30 Juli dalam rangka membahas Pending matter terkait Input data ketertelusuran oleh Pembudi daya ikan dalam Stelina serta Rencana Aksi Perubahan Regulasi STELINA.
- 2) Pembahasan Lanjutan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang STELINA pada tanggal 18 Juli 2024 dan Konsultasi Publik Perubahan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang STELINA pada tanggal 6 Agustus 2024 di Jakarta.



Gambar 34 Konsultasi Publik Perubahan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang STELINA

- 3) Melaksanakan uji petik Revisi Permen KP STELINA ke beberapa pelaku usaha yang dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 8 Agustus 2024 di Provinsi Bali dan melakukan pertemuan dengan ASTUIN.
 - 4) Sosialisasi Sosialisasi Pengelolaan Gudang Beku (Warehouse Management System/WMS) wilayah Aceh pada tanggal 23 Juli 2024 yang diikuti oleh dari Perwakilan dari Sekretariat Ditjen PDSPKP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, Dinas Kab/Kota yang membidangi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Aceh serta Pelaku Usaha Cold Storage.
- b. Pembinaan Lembaga Pengelola Logistik Ikan dalam rangka penataan rantai pasok sampai dengan periode triwulan III telah tercapai tiga lembaga yaitu (1) Kelompok Kerja Sistem Logistik Ikan Nasional Provinsi Papua (2) Kelompok Kerja

Sistem Logistik Ikan Nasional Provinsi Maluku dan (3) Kelompok Kerja Sistem Logistik Ikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara.

- c. Penyusunan Rekomendasi Pengendalian Pemasukan Hasil Perikanan berdasarkan Neraca Komoditas samapi dengan triwulan III telah tersusun 3 dokumen rekomendasi antara lain (1) Analisis ketersediaan dan kebutuhan bahan baku usaha pelumatan tahun 2025 (2) Analisis ketersediaan dan kebutuhan bahan baku umpan tahun 2025 dan (5) Analisis ketersediaan dan kebutuhan hasil perikanan untuk Horekapasmod dan pereduksian/bahan pengayaan makanan tahun 2025, beberapa kegiatan pendukung antara lain :
 - 1) Kegiatan Lanjutan Penyusunan Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Komoditas Perikanan untuk HOREKAPASMOD yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2024 dalam rangka penyusunan *outline* laporan analisis kebutuhan dan ketersediaan ikan umpan, bahan baku pemindangan, serta hotel, restoran, catering, dan pasar modern (horekapasmod), serta penentuan *timeline* penyelesaian laporan.
 - 2) Koordinasi Kendala Pengajuan Perizinan Impor Perubahan Komoditas Perikanan Tahun 2024 yang dilaksanakan 30 Juli 2024 yang dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Efisiensi Proses Bisnis LNSW, Direktorat Teknologi Informasi LNSW, Direktorat Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan LNSW, Direktorat Impor Kemendag, Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendag, Pusdatin KKP, dan Tim kerja lingkup Ditjen PDSPKP.
- d. Kemitraan dalam rangka pengadaan, penyimpanan dan distribusi sampai dengan triwulan III telah tercapai 11 kesepakatan antara lain 8 kesepakatan dalam rangka pengadaan distribusi dan transportasi hasil perikanan dan 3 kesepakatan dalam rangka penyimpanan. Beberapa kegiatan pendukung antara lain :
 - 1) Melaksanakan Koordinasi terkait Solusi Kelimpahan Tangkapan Ikan Tuna di Morotai pada tanggal 8 Juli 2024 secara luring dengan Dinas Kabupaten

Morotai, Pimpinan PT. Harta Samudra Morotai, Penanggung jawab SKPT, Pimpinan PT. Nutrindo Freshfood Internasional, Yahya Hudaya (Perijinan), perwakilan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap, perwakilan dan perwakilan tim kerja Ditjen PDSPKP guna mencari solusi terhadap melimpahnya hasil tangkapan Tuna di Morotai.

- 2) Melaksanakan Fasilitasi Akses Transportasi dan Distribusi Ikan Hias Menggunakan Moda Kereta Api yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2024 di Blitar.



Gambar 35 Fasilitasi Akses Transportasi dan Distribusi Ikan Hias

Menggunakan Moda Kereta Api

- 3) Melaksanakan Sosialisasi Draft Petunjuk Teknis Penerbitan Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB), Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB), Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB), Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Kapal, Kelayakan Pengolahan Ikan (SKP), Cara Distribusi Ikan Yang Baik (CDIB) dan HACCP. Bandung, 15 Agustus 2024.
- 4) Pembahasan pedoman CDIB sesuai prinsip HACCP pada di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2024 .
- 5) Finalisasi Pedoman Pembinaan Cara Distribusi Ikan yang Baik (CDIB) di Bogor 5 September 2024
- 6) Pembahasan Manajemen Risiko Penyediaan Kapal Angkut Ikan, Jakarta 4 September 2024

- 7) Rapat Upaya Penguatan Koridor Logistik Pada Penangkapan Ikan Terukur, Jakarta 6 September 2024
- e. Pengadaan gudang beku portable merupakan tempat penyimpanan hasil perikanan pada suhu tertentu dengan atau tanpa Air Blast Freezer yang dilengkapi pondasi, atap/rumah pelindung, genset dan peralatan pendukung, memenuhi persyaratan sarana untuk berproduksi yang baik, penerapan sanitasi higienis, mudah dalam pemasangan, dan dapat dipindahkan. Sarana distribusi logistik produk KP, dan sarana distribusi logistik produk KP mendukung Korporasi merupakan kendaraan roda empat dan/atau roda enam yang dilengkapi dengan boks berinsulasi dan mesin pendingin yang berfungsi menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan selama dalam pengangkutan dan pendistribusian. Pengadaan gudang beku portable dan Sarana distribusi logistik produk KP tahun 2024 pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 10 Unit, sampai dengan periode triwulan III 4 unit sudah proses pekerjaan mulai tanggal 11 September s.d 4 Desember dengan nilai kontrak Rp.8.085.000.000 di Subang, Karawang, Bau-bau, Jakarta Selatan. 4 unit sudah proses pekerjaan mulai tanggal 3 September s.d 6 Desember dengan nilai kontrak Rp8.590.000.000 di Garut, Pangandaran, Aceh Jaya, Lebak. 2 Lokasi dalam proses ekatalog Karangasem dan Tangerang.
- f. Fasilitasi Pengelola Gudang untuk Penerapan Sistem Resi Gudang triwulan III adalah 8 lembaga antara lain (1) Perumda Karya Lasinrang yang berdomisili di Kabupaten Pinrang dengan komoditas rumput laut, (2) CV. Anugerah Agung Global yang berdomisili di Kota Palopo dengan komoditas rumput laut (3) PT Ajaib Toha Putra, Kab. Pati, komoditas ikan (4) PT Monster Lautan Indonesia, Kab. Pati, komoditas : ikan (5) PT Asia Makmur Rejeki, Kab. Pati, komoditas: ikan (6) PT Delta Mina Perkasa, Kab. Sidoarjo, Komoditas : Ikan Pelagis Kecil (7) PT Surya Indo Algas, Surabaya, Komoditas :Ikan Pelagis Kecil dan (8) PT Alam Jaya,

Surabaya, Komoditas:Ikan Pelagis Kecil. Beberapa kegiatan pendukung antara lain :

- 1) Rapat Koordinasi Sistem Resi Gudang bersama BAPPEBTI dan PT KBI pada tanggal 3 September 2024 di Jakarta
 - 2) Pendampingan Calon pengelola resi Gudang bersama Tim Bidang Pemberdayan SRG BAPPEBTI, Tim Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pembiayaan Skema Subsidi SRG dan Pendampingan Kasus SRG BAPPEBTI, Direktur PT. Adi Putra Lautan, Koperasi Jeeva Bumi Nusantara, PT Ajaib Toha, PT. Asia Makmur, PT Surya Indoalgas, PT. Alam Jaya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2024
 - 3) Pemantauan Ketersediaan ikan dan Identifikasi Calon Pengelola Gudang Sistem Resi Gudang di Pasuruan pada tanggal 5 September 2024
- g. Fasilitasi Pengelola Kapal Pengangkut dalam mendukung logistik Hasil Perikanan dilaksanakan melalui kegiatan antara lain Uji Coba Implementasi Pedoman dan Penilaian CDIB pada Pelaku Usaha Serta Penandatanganan Kesepakatan Bersama pada tanggal 23 s.d 25 September 2024 di Pati.



Gambar 36 Uji Coba Implementasi Pedoman dan Penilaian CDIB

6. Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program

Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program menunjukkan jumlah realisasi pembiayaan kredit program yang disalurkan oleh lembaga perbankan dan lembaga keuangan bukan bank (non bank) kepada UMKM

kelautan dan perikanan (KP). Ditjen PDSPKP terus berupaya mendorong peningkatan nilai pembiayaan usaha KP dengan melakukan pemantauan penyaluran kredit program dari perbankan yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan pembiayaan dari lembaga keuangan non bank yaitu pembiayaan Ultra Mikro (UMi) yang disalurkan oleh *Holding* Ultra Mikro, salah satunya yaitu PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui program Mekaar. Berbagai kegiatan strategis dilakukan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha KP, diantaranya fasilitasi akses pembiayaan melalui pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) baik di pusat maupun daerah, pendampingan usaha, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyaluran kredit program.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program pada tahun 2024 sebesar Rp 10,26 Triliun. Untuk mencapai target tersebut, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) terus berupaya mendorong peningkatan realisasi Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program, antara lain: Pembentukan POKJA Kredit Program Kelautan dan Perikanan, Koordinasi dan sinergi secara berkala dengan lembaga keuangan bank dan nonbank, Fasilitasi Akses Pembiayaan Sektor Kelautan dan Perikanan dan sosialisasi, pembinaan dan fasilitasi akses kredit sektor kelautan dan perikanan melalui kegiatan Gerai Investasi dan Layanan Usaha (GISELA).

Tabel 11 Ikhtisar Pencapaian Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d TW III 2024			TW III 2024	TW II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program (Rp. Triliun)	6	2,2	7,2	10,26	6,06	3,98	4,62	6,06	101,00	59,06	52,26	31,17

Sumber : SIKP, Kemenkeu dan PT. PNM, September 2024, diolah Ditjen PDSPKP

Realisasi pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program pada triwulan III tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp6,06 triliun, yakni tercapai 101,00% atau mencapai 59,06% jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yakni Rp10,26 triliun. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya sebesar Rp3,98 triliun maka capaian ini mengalami peningkatan sebesar 52,26% dan 31,17% dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp5,1 triliun.

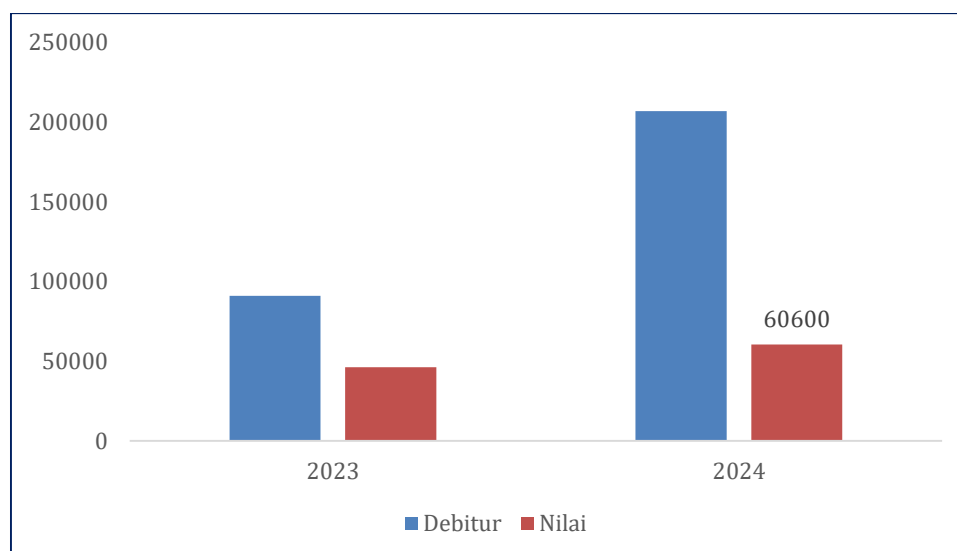
Total realisasi pembiayaan usaha KP melalui Kredit Program sebesar Rp6,06 Triliun yang disalurkan kepada 207.076 pelaku usaha KP terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp5,51 triliun yang disalurkan kepada 104.375 pelaku usaha, dan Kredit Ultra Mikro (UMi) sebesar Rp546,89 milyar yang disalurkan kepada 102,701 pelaku usaha.

Tabel 12 Rincian Pembiayaan Kredit Program di Sektor Kelautan dan Perikanan
Triwulan III Tahun 2024

Sumber Pembiayaan	Nilai (Rp)	Debitur (Pelaku Usaha)	Persentase terhadap Total Nilai (%)
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	5.514.929.201.000	104,375	90,97
Ultra Mikro (UMi)	546.893.500.000	102,701	9,03
Total	6,061,822,701,000	207,076	100

Sumber : SIKP, Kemenkeu dan PT. PNM, September 2024, diolah Ditjen PDSPKP

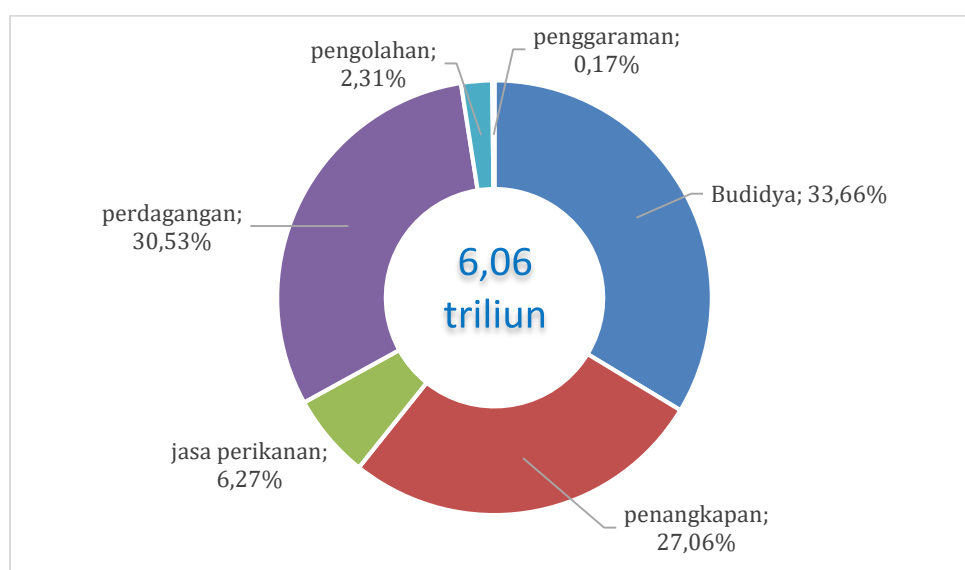
Kontribusi KUR terhadap nilai pembiayaan usaha sektor KP mencapai 90,97% dari capaian pembiayaan sektor KP. Realisasi KUR sektor KP pada Triwulan III tahun 2024 adalah sebesar Rp5,51 triliun, tumbuh sebesar 19,26% dibandingkan dengan Triwulan III tahun 2023 sebesar Rp4,62 triliun. Demikian pula dengan jumlah penerima KUR sebanyak 104.375 debitur pada triwulan III tahun 2024, tumbuh sebesar 14,70% dibandingkan Triwulan II tahun 2023 sebanyak 90.991 debitur. Sementara untuk nilai kredit Ultra Mikro (UMi) dibandingkan dengan triwulan III tahun 2023 tumbuh sebesar 13,46% dari Rp481 Miliar dan untuk jumlah debiturnya tumbuh sebesar 14,83% dari 89.436 debitur.



Sumber : SIKP, Kemenkeu dan PT. PNM, Juni 2024, diolah Ditjen PDSPKP

Gambar 37. Realisasi Pembiayaan Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan
Triwulan III Tahun 2024

Realisasi pembiayaan sampai dengan periode triwulan III berdasarkan bidang usaha sektor kelautan dan perikanan sebagai berikut : (1) Budidaya ikan senilai Rp2,04 Triliun (17,91%); (2) Perdagangan hasil perikanan Rp1,85 triliun (31,20%); (3) Penangkapan ikan Rp1,64 triliun (59,22%); (4) Jasa Perikanan Rp0,38 triliun (15,15%); (5) Pengolahan hasil perikanan Rp0,14 triliun (16,66%); dan (6) Penggaraman Rp0,01 triliun (0,01%).



Gambar 38 Realisasi Pembiayaan Kredit Program Sektor Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan bidang usaha

Pada tahun 2024, Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan melalui Kredit Program sebesar Rp14.423.500.000,- dan telah terealisasi sebesar 7.952.927.000,- atau setara dengan 55,14%.

Ditjen PDSPKP terus melakukan upaya dalam rangka mendorong pencapaian nilai pembiayaan usaha KP, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan selama Triwulan III diantaranya:

- a. Peningkatan kapasitas lembaga usaha KP telah dilakukan kepada lembaga usaha dengan kategori: 1) lembaga usaha non formal (kelompok pengolah dan pemasar) menjadi lembaga usaha formal/berbadan hukum, 2) lembaga usaha berbadan

hukum namun perlu dilakukan penguatan kembali karena mendukung program tertentu seperti korporasi nelayan, klaster daya saing, kampung nelayan maju, kampung budidaya, Inkubator Mina Bisnis dan program lainnya. Sampai dengan triwulan III telah tercapai 26 lembaga.



Gambar 39 Bimbingan Teknis Kelembagaan Usaha Subsektor Pengolahan dan Pemasaran untuk Wilayah

- b. Penumbuhan dan pembinaan wirausaha hasil KP dilaksanakan dalam rangka mendorong tumbuhnya wirausaha baru dan pembinaan terhadap wirausaha bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan sebagai upaya mendukung peningkatan rasio kewirausahaan serta keberlanjutan usaha wirausaha baru dan wirausaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan. Sasaran yang ingin dicapai melalui kegiatan ini terlaksananya fasilitas pendampingan dan pembinaan UMKM sektor hasil kelautan dan perikanan. Sampai dengan periode triwulan III tahun 2024 telah tercapai sebanyak 650UMKM/wirausaha.



Gambar 40 Kegiatan Pendampingan Wirausaha

- c. Fasilitasi pemberdayaan usaha UMKM KP melalui intermediasi dalam kegiatan pemberdayaan usaha sektor kelautan dan perikanan, yang terdiri atas fasilitasi akses pembiayaan kredit program dan/atau fasilitasi pada pendampingan Gerai Investasi dan layanan usaha (GISELA) dan kegiatan pemberdayaan lainnya (fasilitasi kemitraan, perizinan dan kelembagaan). Sampai dengan periode triwulan II tahun 2024 telah tercapai sebanyak 1.473 UMKM/wirausaha.
- d. Fasilitasi kemitraan usaha UMKM KP melalui kerja sama dalam kegiatan penanaman modal untuk Bidang Usaha yang terbuka dengan persyaratan baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha mikro kecil untuk mampu mengembangkan jaringan usahanya melalui kerja sama kemitraan dengan pelaku usaha menengah besar. Fokus dari fasilitasi kemitraan usaha ini tersebar di seluruh bidang usaha sektor kelautan dan perikanan. Sampai dengan periode triwulan II tahun 2024 telah tercapai sebanyak 75 UMKM/wirausaha.



Gambar 41 Kegiatan Fasilitasi Kemitraan dan Penguatan Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan

7. Nilai PNBP Ditjen PDSPKP

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan usaha dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak

langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Tabel 13 Ikhtisar Pencapaian Nilai PNBP Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	TW III 2024			TW III 2024	TW II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai PNBP Ditjen PDSPKP (Rp. Miliar)	5,7	3,8	-	7,62	6,83	5,19	-	5,19	119,82	89,63	31,60	-

Nilai PNBP Ditjen PDSPKP pada tahun 2024 triwulan III mencapai Rp6,83 miliar. Capaian dimaksud setara dengan 119,82% terhadap target triwulan III tahun 2024 sebesar Rp5,7 miliar atau 89,63% terhadap target tahun 2024 sebesar Rp7,62 miliar. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya sebesar Rp5,19 miliar maka capaian ini mengalami peningkatan sebesar 31,60%. Pada tahun 2023 indikator ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, Ditjen PDSPKP telah melakukan penyampaian laporan yang sudah disahkan kepada Biro Keuangan dan KKP dan Inspektorat Jenderal KKP secara berkala.

8. Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik baik di bidang logistik hasil kelautan dan perikanan,

pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pemasaran hasil kelautan dan perikanan, usaha dan investasi dan pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan.

Tabel 14 Ikhtisar Pencapaian Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d TW III 2024			TW III 2024	TW II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	38010	16705	-	66000	40967	19570	-	40967	107,78	62,07	109,34	-

Realisasi Tenaga Kerja yang Terlibat Bidang Penguatan Daya Saing Produk KP pada periode triwulan III tahun 2024 mencapai 40.967 orang atau setara dengan 107,78% terhadap target periode triwulan III tahun 2024 sebesar 38.010 orang. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 66.000 orang, maka capaian sampai dengan Triwulan III tahun 2024 telah mencapai 62,07%. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya sebesar 16.705 orang maka capaian ini mengalami peningkatan sebesar 109,34%. Pada tahun 2023 indikator ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum dapat dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Data capaian tenaga kerja yang terlibat dalam sektor penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan periode triwulan II tahun 2024 diperoleh dari jumlah seluruh orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat dari kegiatan bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yaitu:

1. Tenaga kerja yang terlibat di bidang pemasaran hasil kelautan dan perikanan adalah 11.770 orang dari target 11.770 orang atau setara 100%;

2. Tenaga kerja yang terlibat di bidang pengolahan adalah 19.466 orang dari target 19.080 orang atau setara 107,33%;
3. Tenaga kerja yang terlibat di bidang usaha dan investasi kelautan dan perikanan adalah 9.237 orang dari target 6.860 orang atau setara 134,65%.
4. Tenaga kerja yang terlibat di bidang logistik kelautan dan perikanan adalah 200 orang dari target 200 orang atau setara dengan 100%. Tenaga kerja ini diperoleh dari anggota koperasi/kelompok penerima bantuan pemerintah;
5. Tenaga kerja yang terlibat di bidang pengujian penerapan produk kelautan dan perikanan adalah 294 orang dari target 100 orang atau setara dengan 294%;

Sasaran 4. Kesejahteraan Pengolah Hasil Perikanan Meningkat

9. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)

Secara konseptual nilai tukar pengolah hasil perikanan adalah pengukur kemampuan tukar produk olahan hasil perikanan yang dihasilkan pengolah hasil perikanan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam proses produksi pengolahan hasil perikanan. Dari angka NTPHP dapat pula diketahui tingkat daya saing suatu produk olahan hasil perikanan dibandingkan dengan produk lain, sehingga arah pengembangan kebijakan pada spesialisasi produk unggulan wilayah yang berkualitas dapat dilakukan.

NTPHP merupakan perbandingan indeks harga yang diterima rumah tangga pengolah hasil perikanan dengan indeks harga yang dibayar rumah tangga pengolah hasil perikanan. NTPHP dihitung berdasar *sampling* yang akan dilakukan di 40 Kabupaten/Kota yang tersebar di 5 Provinsi. Lokasi yang menjadi *sampling* dipilih berdasarkan kesepakatan antara Ditjen PDSPKP dengan Badan Pusat Statistik (BPS) saat pengambilan tahun dasar untuk perhitungan NTPHP di tahun 2015. Beberapa pertimbangan dalam pengambilan keputusan tersebut adalah banyaknya jumlah UPI terutama skala mikro dan kecil dan variasi jenis kegiatan pengolahan

ikan pada kelima provinsi tersebut sehingga dapat mewakili seluruh provinsi di Indonesia.



Gambar 42 Lokasi Sampling Perhitungan NTPHP

Tabel 15 Ikhtisar Pencapaian Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW I 2024	TW III 2024	TW II 2024			TW III 2024	TW II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (Indeks)	104,75	-	-	104,75	104,9	-	-	104,9	100,14	100,14	-	-

Indikator kinerja Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) pada tahun 2024 pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 104,75. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan secara Semesteran sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan III tahun 2024 serta belum dapat dibandingkan baik dengan target tahunan dan capaian triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sampai dengan September sebesar Rp5.9003.187,-. Realisasi ini setara dengan 13,75% terhadap pagu anggaran sebesar Rp42.919.100.000-.

realisasi anggaran indikator kinerja ini masih kecil dikarenakan kegiatan pendukung pencapaian IKU adalah kegiatan kontraktual, yang proses penyerapan anggaran dilakukan diakhir periode kontrak selesai.

Pada Triwulan III tahun 2024, Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, antara lain:

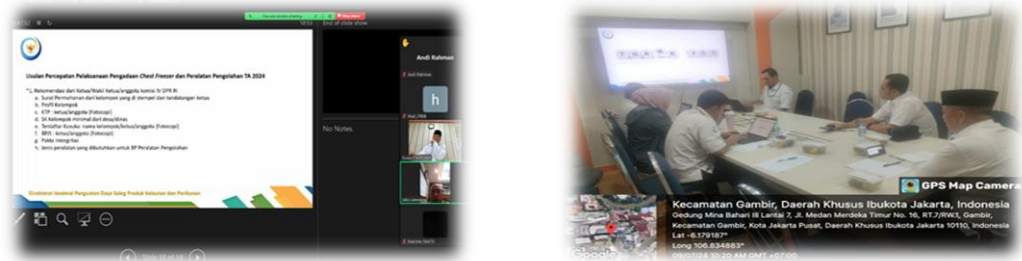
- a. Pengadaan Pabrik Es *Portable* nelayan di lokasi kampung nelayan modern. Pabrik es *portable* adalah Bantuan Pemerintah berupa bangunan dan/atau instalasi sistem pendingin pabrik es *portable* yang berfungsi membuat es balok sesuai dengan ukurannya. Pada tahun 2024, target Tersedianya Prasarana Rantai Dingin Dan Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan adalah sebanyak 10 Unit, sampai dengan periode triwulan III terdapat 4 Unit (Situbondo, Belitung, Baubau, dan Trenggalek) yang sudah dalam tahap tanda tangan surat pesanan. Pabrik es *portable* di Situbondo sudah pada proses penyelesaian pekerjaan (fisik 100%) di akhir bulan September. Sementara untuk 3 pabrik es lainnya, yaitu di Kab. Belitung, Kota Bau Bau, dan Kab. Trenggalek saat ini sedang proses pelaksanaan pekerjaan, baik di *workshop* maupun di lapangan. Dan untuk 6 paket lainnya sedang dalam persiapan proses pemilihan penyedia, yaitu untuk pabrik es di Kab. Aceh Jaya, Kab. Lampung Selatan, DI. Yogyakarta, Kab. Pacitan, Kab. Tulungagung, dan Kota Gorontalo.



Gambar 43 Rapat Koordinasi Rencana Bantuan Pemerintah Pabrik Es Portable

- b. Pengadaan *chest freezer* sebanyak 311 unit. Bantuan pemerintah ini bertujuan untuk mendukung proses produksi bisnis kelautan dan perikanan di sektor hilir

terutama bagi Unit Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil sehingga meningkatkan produksi olahannya dengan mutu yang tetap terjaga dan memberikan nilai tambah bagi UMK. Sampai dengan periode triwulan III bantuan sudah 311 unit telah dilakukan proses pengiriman ke 23 propinsi, 92 kabupaten/kota dan 269 kelompok.



Gambar 44 Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Bantuan Pemerintah *Chest Freezer*

- c. Pengadaan peralatan pengolahan sebanyak 315 unit. Peralatan pengolahan ikan yang disediakan merupakan Jumlah Bantuan Pemerintah berupa peralatan yang digunakan untuk penanganan dan pengolahan ikan. Adapun paket peralatan yang disediakan antara lain : peralatan pengolahan pindang ikan (termasuk jenis olahan pindang presto atau yang sejenis)/pengasapan ikan/pelumatan daging (bakso dan *value added*)/pengasinan ikan atau ikan kering/kerupuk ikan (termasuk jenis olahan keripik atau yang sejenis)/fermentasi (kecap, terasi)/peralatan pengolahan ikan lainnya (abon dan lain-lain). Sampai dengan periode triwulan III masih dalam proses proses penadatangan surat pesanan untuk 165 unit peralatan pengolahan. Pada minggu ke-2 bulan September 2024 telah dilakukan proses pengiriman sebanyak 54 paket untuk jenis peralatan *Value Added*, Ikan Asin dan Ikan Asap.

- d. Pengadaan Sarana Pasca Panen (SPP) yang disediakan yang disediakan sebanyak 9 unit dan 8 unit mendukung korporasi. Bantuan pemerintah ini berupa tempat dan peralatan *portable* yang digunakan untuk menangani bahan baku hasil kelautan dan perikanan pasca panen sebelum diolah lebih lanjut. sampai dengan periode triwulan III sarana pasca panen yang disediakan sudah dilakukan penadatangan surat pesanan untuk 9 unit SPP. Untuk 5 unit SPP di Lampulo, Kab. Lampung Selatan, Kota Serang, Kab. Ciamis, dan Kab. Banyumas) fisiknya telah mencapai 100 % . Sedangkan untuk 4 lokasi BP SPP yaitu di Kab. Jepara, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Maluku Tenggara, dan Kab. Rote Ndao sedang proses pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Dan untuk kegiatan sarana pasca panen mendukung korporasi yang disediakan 8 paket SPP sudah selesai diadakan (fisik 100 %). Lokasi BP SPP Korporasi yaitu di : Kab. Situbondo, Kab. Gunung Kidul, Kab. Purwakarta, Kab. Tasikmalaya, Kab. Lombok Tengah, Kota Padang, Kab.Lampung Timur, dan Kab.Pangkep.



Gambar 45 Rapat Koordinasi dengan Dinas KP penerima BP SPP

- e. Menyelenggarakan rapat koordinasi Validasi Data dan Penghitungan Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) yang dilaksanakan pada tanggal 18-20 Juli 2024 di Bogor dengan tujuan untuk melakukan validasi data monitoring harga produsen dan harga konsumen yang disampaikan oleh Enumerator Daerah. Kegiatan melibatkan BBRSEKP, Pusdatin, BRIN, Tim Kerja Data dan Layanan

Publik Ditjen PDSKP, dan Timja Pengembangan dan Penerapan Standar Direktorat PBM.



Gambar 46 Validasi Data dan Penghitungan Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan (NTPHP) 2024

Sasaran 5. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Mendukung Penguatan Daya Saing KP

10. Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP

WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat hasil penilaian indikator pengungkit dan indikator hasil lebih besar atau sama dengan 75 serta memenuhi syarat lain sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Piagam Penghargaan dari Menteri Kelautan dan Perikanan.

WBK merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi minimal 60% pada area pembangunan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik. Penilaian Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK berpedoman pada

Lembar Kerja Evaluasi yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Tabel 16 Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Lingkup Ditjen PDSPKP

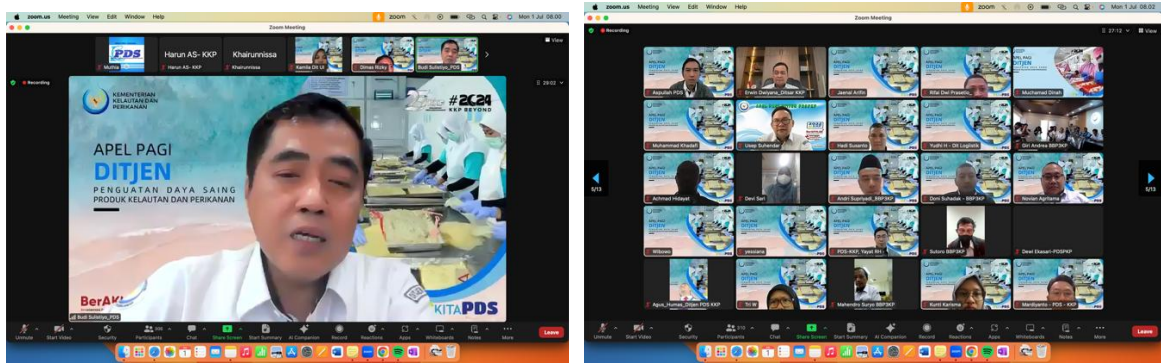
Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW I 2024	TW III 2024	s.d TW III 2024			TW II 2024	TW III 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Lingkup Ditjen PDSPKP (Unit)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2024, Unit Kerja yang berpredikat menuju WBK lingkup Ditjen PDSPKP ditargetkan sebanyak 2 unit kerja. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan II tahun 2024 serta belum dapat dibandingkan baik dengan capaian triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.503.382.000,- sampai dengan Bulan September 2024. Realisasi ini setara dengan 45,88% terhadap pagu anggaran sebesar Rp3.276.651.000,-.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Pelaksanaan Apel Pagi dan Briefing Reformasi Birokrasi oleh seluruh unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP secara berkala setiap hari senin dan diikuti oleh seluruh pegawai;



Gambar 47 Apel Pagi Lingkup Ditjen PDSPKP

- b. Melaksanakan Finalisasi Cascading IKU terhadap Calon UPT Ditjen PDSPKP pada tanggal 2 Juli 2024 yang merupakan tindak lanjut atas pembahasan rancangan IKU Ditjen PDSPKP tahun 2025-2029 ;
- c. Melaksanakan Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama dengan Tugas Fungsi Calon UPT Ditjen PDSPKP pada tanggal 4 s.d 5 Juli 2024 dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan spesifik dan fungsi utama dari UPT yang diusulkan. Kegiatan ini diharapkan mampu memastikan bahwa UPT yang akan dibentuk memiliki peran yang jelas dan signifikan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi instansi induknya, sehingga meningkatkan peluang disetujuinya usulan UPT Ditjen PDSPKP oleh Kemen PANRB;
- d. Melaksanakan pembahasan Penilaian Adibakti Mina Bahari (AMB) Pelayanan pada tanggal 10 Juli 2024 dalam rangka menentukan UPP sebelum diusulkan sebagai calon penerima AMB Pelayanan untuk penilaian oleh Tim Penilai Kementerian. Selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2024 dilaksanakan Pleno Penilaian UPP sebagai Calon Penghargaan AMB Pelayanan.
- e. Melaksanakan koordinasi rekomendasi rencana pembentukan UPT pada tanggal 16 s.d 17 Juli 2024 dengan Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan

membahas rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis Ditjen PDSPKP dan menyampaikan urgensinya Balai Pengujian Standar dan Pengolahan Produk Garam (BPSPPG) yang berlokasi di Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur terkait aspek administratif dan kewenangan antara pusat dan daerah.

- f. Melaksanakan Penyusunan Proses Bisnis Level 2 dan Cross Functional Map Lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 20 Agustus 2024 untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi;
- g. Melaksanakan Penyusunan Proses Bisnis Level 2 dan Cross Functional Map (CFM) Direktorat Pemberdayaan Usaha pada tanggal 30 Agustus 2024, Direktorat Logistik pada tanggal 2 September 2024, Direktorat Pengolahan pada tanggal 3 September 2024 dan Direktorat Pemasaran pada Tanggal 4 September 2024.



Gambar 48 Penyusunan Proses Bisnis Level 2 dan Cross Functional Map (CFM)

- h. Melaksanakan Koordinasi Pembentukan UPT Balai Standardisasi Mekanisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan pada tanggal 10 September 2024 dalam rangka pemenuhan syarat pembentukan Unit Penyelenggara Teknis (UPT) Balai Standardisasi Mekanisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan;

11. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang

dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tabel 17 Ikhtisar Pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d TW III 2024			TW II 2024	TW III 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP (Nilai)	-	-	-	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-

Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP pada tahun 2024 ditargetkan 3,3. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan III tahun 2024 serta belum dapat dibandingkan baik dengan target tahunan dan capaian triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 telah dilakukan oleh Tim Asesor KKP. Penjaminan kualitas oleh Tim Penjaminan Kualitas yang dilakukan terhadap 3 (tiga) komponen penilaian, yaitu Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses, dan Pencapaian Tujuan yang kemudian akan dilakukan evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP digunakan sebagai pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat Unit Organisasi Eselon I yang diambil dari nilai komponen Struktur dan Proses (Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian

Tujuan Organisasi (T1) dan telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Mitra.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp525.959.435,- sampai dengan Juni 2024. Realisasi ini setara dengan 95,07% terhadap pagu anggaran sebesar Rp553.212.000,-.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP antara lain:

- 1) Melaksanakan pembahasan penyusunan Laporan SPIP Triwulan II Tahun 2024 yang diadakan pada tanggal 16 Juli 2024 bertempat di Ruang Rapat Branding GMB III. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP dan tim kerja lingkup Sekretariat Ditjen PDSPKP terkait. Pada pembahasan ini dilakukan *update* atas realisasi pengendalian pada form pemantauan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko serta laporan SPIP triwulan II 2024.
- 2) Melaksanakan pembahasan Dokumen Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi pada tanggal 19 Juli 2024 bertempat di Ruang Rapat Investasi GMB III. Kegiatan tersebut membahas penyiapan dokumen yang diperlukan pada komponen struktur proses serta melengkapi dokumen sesuai dengan kertas kerja berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- 3) Keikutsertaan pada kegiatan penginputan data persiapan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP KKP pada tanggal 25 s.d 26 Juli 2024 di ruang rapat Inovasi GMB III lantai 2. Pada kegiatan ini dibahas terkait dokumen pendukung maturitas SPIP pada struktur proses dan proses penginputan struktur proses dilakukan setelah penginputan penetapan tujuan selesai dilakukan.

- 4) Keikutsertaan pada penginputan data penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP KKP tanggal 1 s.d 2 Agustus 2024. Rapat dihadiri perwakilan satgas SPIP lingkup KKP dan agenda dalam kegiatan ini adalah penginputan ke dalam aplikasi SPIP Terintegrasi berupa penetapan tujuan, struktur proses dan penetapan tujuan.
- 5) Keikutsertaan pada kegiatan rekonsiliasi penjaminan kualitas maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 di Lingkungan KKP tanggal 21 s.d 24 Agustus 2024 di Padjadjaran Hotel Bogor. Acara dihadiri oleh perwakilan eselon I lingkup KKP dengan Narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Terdapat beberapa pokok bahasan pada kegiatan ini yaitu:
 - Nilai maturitas SPIP KKP tahun 2023 adalah sebesar 3,56. Ini berarti bahwa KKP Masih pada level terdefinisi yaitu organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi serta pengendalian telah dilaksanakan namun masih belum efektif
 - manfaat penyelenggaraan dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu Instansi dapat melakukan perbaikan kualitas perencanaan secara berkelanjutan, mengenali dan mengatasi risiko-risiko atas pelaksanaan program dan kegiatan, meminimalisir risiko terjadinya korupsi/*fraud*, menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pengendalian intern secara berkelanjutan serta tercapainya tujuan instansi secara efektif dan efisien, laporan keuangan yang handal, aset yang aman, dan taat Per Undang-undangan
 - Strategi Implementasi Maturitas SPIP: Komitmen Manajemen Instansi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan menerapkan manajemen risiko untuk mendukung pencapaian program yang telah direncanakan. APIP mendorong penerapan Manajemen Risiko termasuk atas risiko-risiko *fraud*/korupsi, melakukan pengawasan pada area-area yg berisiko tinggi

melalui Pengawasan Intern Berbasis Risiko, dan mendorong perbaikan pengendalian intern secara berkelanjutan serta komitmen untuk meningkatkan kompetensi SDM agar mampu menyelenggarakan pengendalian intern secara memadai dan melakukan penilaian kualitasnya (maturitas SPIP).

- Rekomendasi dalam peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP:
 - a) Meningkatkan kualitas perencanaan dengan melakukan pengendalian secara terintegrasi terhadap *cascading* Sasaran Strategis sampai dengan unit kerja menggunakan sarana teknologi informasi;
 - b) Meningkatkan kualitas struktur dan proses pengendalian intern dengan menerapkan:
 - Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan proses bisnis dan proses perencanaan organisasi,
 - melakukan identifikasi dan analisis probabilitas praktik korupsi pada kegiatan utama organisasi,
 - melakukan pengambilan keputusan berdasarkan manajemen risiko, dan meningkatkan kompetensi pegawai terkait manajemen risiko, serta;
 - mengimplementasikan tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja dan risiko strategis unit kerja eselon I dan kementerian.
 - c) Meningkatkan kualitas kinerja melalui:
 - Evaluasi terhadap indikator output dan outcome yang capaiannya belum memenuhi target atau melebihi batas tertinggi persentase capaian target untuk dikaji kembali penetapan target pada tahun berikutnya;
 - Evaluasi berkelanjutan untuk memitigasi risiko pengelolaan keuangan secara terintegrasi sejak perencanaan hingga pelaporan;

- Peningkatan Pengendalian intern dalam pengelolaan BMN karena masih terdapat catatan pengelolaan BMN pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;
- Optimalisasi peran dan fungsi Tim Satgas SPI KKP, Tim Satgas Eselon I dan Tim SPI Satker dalam mengendalikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dengan menyusun dan menerapkan manajemen risiko.



Gambar 49 Keikutsertaan pada kegiatan rekonsiliasi penjaminan kualitas maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2024 di Lingkungan KKP

12. Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PDSPKP

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018).

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi

- a. Kualifikasi dengan bobot 25% yang dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di *update* pada aplikasi *SIMPEG Online* KKP,
- b. Kompetensi dengan bobot 40% yang diolah datanya dari aplikasi *SIMPEG Online* KKP berdasarkan Penghitungan nilai diklat struktural dan fungsional,

- c. Kinerja dengan bobot 30% diolah datanya dari aplikasi Penilaian Prestasi Kerja *Online* KKP atau data riwayat Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) pada aplikasi SIMPEG *Online* KKP dengan nilai Kinerja dari Kategori, dan
- d. Disiplin dengan bobot 5% diolah datanya dari aplikasi SIMPEG *Online* KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan di update pada aplikasi SIMPEG.

Tabel 18 Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d TW III 2024			TW II 2024	TW III 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP (Indeks)	-	87	76	87	-	82,29	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN lingkungan Ditjen PDSPKP pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 87. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan secara Semesteran sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan III tahun 2024 serta belum dapat dibandingkan baik dengan target tahunan dan capaian triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp35.407.190.695,- sampai dengan Bulan Juni 2024. Realisasi ini setara dengan 53,95% terhadap pagu anggaran sebesar Rp65.632.190.000,-.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indeks profesionalitas ASN lingkup Ditjen PDSPKP antara lain:

- a. Melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional dan pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional bidang PDSPKP pada tanggal 3 s.d 4 Juli 2024 di Bogor. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka (1) Peningkatan kompetensi bagi pejabat APHP, Pembina Mutu HKP dan Asisten Pembina Mutu HKP dan (2) Pembentukan organisasi profesi bagi JF bidang PDSPKP yang meliputi APHP, Pembina Mutu HKP dan Asisten Pembina Mutu HKP.



Gambar 50 Rapat Koordinasi Nasional dan pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional bidang PDSPKP

- b. Melaksanakan kegiatan Verifikasi Usulan formasi jabatan fungsional bidang PDSPKP dari instansi pengguna. Kegiatan pendampingan penghitungan formasi dan Verifikasi Usulan formasi jabatan fungsional bidang PDSPKP dilaksanakan atas usulan yang disampaikan oleh instansi pengguna yakni dinas yang membidangi kelautan dan perikanan provinsi/kabupaten/kota. Beberapa daerah yang telah dilakukan verifikasi antara lain Banten, Sulawesi Selatan dan DI Yogyakarta.
- c. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dan disiplin SDM Aparatur lingkup Ditjen PDSPKP yang dilaksanakan secara rutin setiap triwulan untuk mendapatkan timbal balik sebagai Langkah perbaikan dan peningkatan kinerja

pegawai dan kinerja organisasi. Pada triwulan III 2024, kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2024 dan 16 Juli 2024.



Gambar 51 kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja dan disiplin SDM Aparatur lingkup Ditjen PDSPKP

- d. Melaksanakan Orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara Blended Learning yang difasilitasi oleh BDA Sukamandi secara bertahap yang terdiri dari VIII angkatan. Peningkatan kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku PPPK sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu Berakhlak, Berkinerja, Berdaya Saing, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.



Gambar 52 Orientasi bagi PPPK Blended Learning

- e. Melaksanakan Bimbingan Teknis Pembinaan Karakter dan Disiplin bagi Petugas PTSA Ditjen PDSPKP yang dilaksanakan dalam 2 batch pada tanggal 1 s.d 2 Agustus 2024 di Jakarta. Kegiatan ini merupakan pengembangan kompetensi

pegawai Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan khususnya bagi petugas Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pengelola kepegawaian Setditjen PDSPKP untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pegawai Ditjen PDSPKP khususnya bagi petugas PTSA dan pengelola kepegawaian Setditjen PDSPKP, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih optimal dan meminimalisir terjadinya keluhan pelanggan. Kegiatan dilaksanakan melalui *in-house training* Implementasi Budaya Pelayanan Prima,



Gambar 53 Bimbingan Teknis Pembinaan Karakter dan Disiplin bagi Petugas PTSA Ditjen PDSPKP

- f. Melaksanakan kegiatan penyusunan Standar Kompetensi Teknis (SKT) dan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) lingkup Ditjen PDSPKP yang dilaksanakan untuk mengevaluasi dan perubahan atas SKT dan SKJ yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dilaksanakan sebagai penyesuaian terhadap beberapa ketentuan diantaranya terkait dengan jabatan fungsional. Selama triwulan III 2024, kegiatan ini telah dilaksanakan yaitu tanggal 2 Agustus, 12 Agustus, 19 Agustus dan 15 September 2024 bertempat di Jakarta.
 - g. Melaksanakan kegiatan Penyusunan Human Capital Development Plan (HCDP) Ditjen PDSPKP pada tanggal 5 September 2024 di Jakarta.
- Pembekalan Tenaga Non ASN lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 13 September 2024 di Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan kompetensi

Tenaga Non ASN lingkup Ditjen PDSPK guna mempersiapkan pegawai untuk mengikuti seleksi pengadaan pegawai baik CPNS maupun PPPK .

- h. Melaksanakan Sosialisasi Penyempurnaan KBLI 2020 pada tanggal 4 September 2024 di Jakarta. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut surat Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Nomor B-35/03000/VS.500/2024 tanggal 13 Maret 2024 hal Tindak Lanjut "Kickoff Penyempurnaan KBLI 2020", yang akan mengakomodir usulan perubahan KBLI dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

13. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai PMSAKIP merupakan penilaian mandiri oleh Inspektorat Jenderal KKP terhadap penerapan SAKIP pada unit kerja eselon I KKP yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, serta berorientasi pada penerapan *outcome* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Tabel 19 Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d TW III 2024			TW II 2024	TW III 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	-	-	-	84	-	-	-	-	-	-	-	-

Penilaian Mandiri SAKIP Sekretariat Ditjen PDSPKP pada tahun 2024 ditargetkan

84. Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung

pada triwulan II tahun 2024 serta belum dapat dibandingkan baik dengan capaian triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Sekretariat Ditjen PDSPKP, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp5.529.499.133,- sampai dengan bulan September 2024. Realisasi ini setara dengan 75,77% terhadap pagu anggaran sebesar Rp7.297.742.000,-.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a. Melaksanakan pengukuran dan pengisian capaian kinerja pada sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP pada tanggal 3 Juli 2024 di Jakarta.



Gambar 54 Kegiatan pengukuran dan pengisian capaian kinerja Ditjen PDSPKP

- b. Melaksanakan penyusunan pedoman penilaian mandiri SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 4 s.d 5 Juni 2024 di Jakarta;
- c. Melaksanakan Penilaian mandiri SAKIP level II lingkup Ditjen PDSPKP dan penilaian mandiri SAKIP level I oleh Inspektorat IV;
- d. Melaksanaan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 23 s.d 25 Juli 2024 di Yogyakarta yang melibatkan seluruh unit kerja Ditjen PDSPKP Satker Pusat, UPT dan Dinas KP Provinsi (Tugas Pembantuan) serta Inspektorat Jenderal KKP, Kementerian Keuangan dan Bappenas.



Gambar 55 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga Ditjen PDSPKP Tahun Anggaran 2025

- e. Melaksanakan kegiatan Workshop Penulisan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada Wikipedia Bahasa Indonesia pada tanggal 26 s.d 27 Agustus 2024 di Jakarta;



Gambar 56 Workshop Penulisan Bidang Penguatan Daya Saing Produk

Kelautan dan Perikanan pada Wikipedia Bahasa Indonesia

- f. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja dan melakukan Penyampaian laporan kinerja yang sudah disahkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan serta *stakeholders* terkait secara tepat waktu yakni paling lambat 4 minggu setelah periode pelaporan triwulanan berakhir yang dibuktikan dengan surat resmi. Penyampaian laporan kinerja secara tepat waktu akan meningkatkan penilaian pada aspek pelaporan pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PMSAKIP.

14. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP merupakan jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai tuntutan ganti rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Ditjen PDSPKP Tahun 2022 dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP tahun 2022.

Tabel 20 Ikhtisar Pencapaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW I 2024	TW III 2023	s.d TW III 2024			TW II 2024	TW III 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	-	-	-	<0,5	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja ini bersifat tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan III tahun 2024 serta belum dapat dibandingkan baik dengan target tahunan dan capaian triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sifat polarisasi indikator kinerja batas tertinggi nilai temuan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) dibandingkan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP TA 2024 adalah minimize atau semakin kecil maka kinerjanya semakin baik.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp650.265.000,00 sampai dengan Bulan Maret 2024. Realisasi ini setara dengan 64,51% terhadap pagu anggaran sebesar Rp1.008.002.000,00.

Ditjen PDSPKP pada periode triwulan III telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja antara lain :

- a. Melaksanakan kegiatan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban secara berkala;
2. Melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun 2024 lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 9 s.d 12 Juli 2024. Output kegiatan dimaksud yaitu Laporan Keuangan dan BMN yang sudah melalui proses verifikasi, reviu dengan Inspektorat IV dan otorisasi oleh Tim Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Ditjen PDSPKP;
3. Melaksanakan kegiatan Reviu Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun 2024 lingkup KKP pada tanggal 22 s.d 24 Juli 2024. Output kegiatan dimaksud yaitu Hasil Reviu Laporan Keuangan dan BMN lingkup KKP yang sudah melalui proses reviu dengan Inspektorat V;
4. Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi Pencatatan Aset, Persediaan dan GLP periode Bulanan pada tanggal 7 s.d 8 Agustus 2024. Output kegiatan yaitu pendetilan pencatatan Aset, Persediaan dan GLP pada aplikasi SAKTI lingkup unit eselon 1, Satker Sekretariat dan Satker BBP3KP;
5. Melaksanakan kegiatan Monitoring Rekonsiliasi Pencatatan Keuangan dan BMN Bulan Juli Tahun 2024 lingkup KKP pada tanggal 7 s.d 8 Agustus 2024. Output kegiatan yaitu kertas kerja catatan hasil monitoring kualitas data Laporan Keuangan bulan Juli Tahun 2024;
6. Melaksanakan pemantauan Tindak Lanjut Penyelesaian TLHP BPK RI atas PT. Arjuna Satria Agung.

15. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil

pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik berdasarkan surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 s.d Triwulan IV Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan.

Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan oleh Itjen KKP atau dapat dilihat pada Aplikasi SIDAK dengan periode perhitungan triwulanan.

Tabel 21 Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW I 2024	TW III 2023	s.d TW III 2024			TW II 2024	TW III 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	80	80	75	80	88,64	100	92,86	88,64	110,80	110,80	-11,36	-4,54

Capaian Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen PDSPKP pada Triwulan III tahun 2024 adalah sebesar 88,64%. Capaian ini setara dengan 110,80% terhadap target Triwulan III dan Target tahun 2024 yaitu 80%. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya sebesar 100% maka capaian ini mengalami penurunan 11,36% dan penurunan juga sebesar 4,54% dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 92,86%.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp558.658.000,00 sampai dengan Bulan Juni 2024. Realisasi ini setara dengan 98,60% terhadap pagu anggaran sebesar Rp566.590.000,00.

Pada Triwulan III 2024 Ditjen PDSPKP telah mengadakan pembahasan guna menindak lanjuti atas laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal pada tanggal 11 s.d 13 September 2024. Rapat dihadiri oleh tim Inspektorat Jenderal KKP dan unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP terkait. Pada kegiatan ini dibahas terkait laporan hasil pemeriksaan Itjen beserta dengan tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi. Hal ini bertujuan agar dokumen tersebut dapat diterima oleh tim Inspektorat Jenderal dan dinyatakan tuntas. Atas tindak lanjut tersebut kemudian di upload ke aplikasi <https://sidak.kkp.go.id>. Capaian IKU ini diperoleh dari jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang terbit LHP-nya pada periode 1 Januari 2024 s.d. 30 September 2024 (Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2024) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh Ditjen PDSPKP sampai dengan 30 September Tahun 2024 (Triwulan III Tahun 2024). Terdapat 62 hasil pengawasan di Ditjen PDSPKP dengan 105 rekomendasi, 100 Tuntas (95,24) dan sisa rekomendasi adalah dua (4,76%).

Tabel 22 Data Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2024

No	Unit Kerja	Jumlah Rekom	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekom	% Sisa Rekom
1	Setditjen PDSPKP	44	42	95,45%	2	4,55%
2	Direktorat Logistik	36	34	94,44%	2	5,56%
3	Direktorat Pemasaran	21	20	95,24%	1	4,76%
4	Direktorat Pengolahan	4	4	100%	-	100%
5	Direktorat Pemberdayaan Usaha	-	-	100%	-	100%
6	BBP3KP	-	-	100%	-	100%
	Total	105	100	95,24	5	4,76%

16. Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik

Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan, replikasi maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Inovasi pelayanan publik yang sudah diterapkan oleh unit kerja dapat diikuti dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) adalah kegiatan penjangkaran, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada Inovasi yang telah dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

Untuk mengikuti KIPP, setiap unit kerja mengirimkan proposal inovasi yang memuat informasi, gagasan atau ide mengenai inovasi sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK). Proposal inovasi tersebut dikirimkan kepada Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan cara mengunggah proposal pada SINOVIK.

Tabel 23 Ikhtisar Pencapaian Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik
Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d TW III 2024			TW II 2024	TW III 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	-	-	-	76	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja Nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP yang disusun oleh Ditjen PDSPKP pada tahun 2024 ditargetkan 76. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan III tahun 2024 serta belum dapat dibandingkan baik dengan target tahunan dan capaian triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Kriteria Inovasi Pelayanan Publik mencakup: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi dan berkelanjutan. Sedangkan kelompok inovasi mencakup: kelompok umum dan kelompok khusus. Perhitungan perhitungan capaian untuk aspek penilaian kelompok umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), signifikansi (25%), kontribusi terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (5%), adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%) dan kolaborasi pemangku kepentingan (5%). Aspek penilaian kelompok khusus mencakup pembaruan/peningkatan inovasi (25%), adaptabilitas (20%), penguatan keberlanjutan (25%) dan evaluasi (30%).

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja nilai Hasil Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp923.048.572,00. Realisasi dimaksud setara dengan 75,11% dari alokasi anggaran sebesar Rp1.228.929.000,00.

Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa upaya dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini antara lain:

1. Melaksanakan *Review* Proposal Inovasi Direktorat Pengolahan, Direktorat Pemasaran, dan BBP3KP pada tanggal 1 Juli 2024;
2. Melaksanakan *Review* Proposal Inovasi Direktorat Pengolahan dan Direktorat Pemasaran pada tanggal 4 Juli 2024;
3. Melaksanakan Rapat Finalisasi Proposal Inovasi Pelayanan Publik Ditjen PDSPKP pada tanggal 15 Juli 2024;
4. Melaksanakan Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 22 Juli 2024;
5. Melaksanakan Rapat Pleno Penilaian Proposal KIPP pada tanggal 23 Juli 2024;
6. Keikutsertaan pada kegiatan Pleno Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik pada tanggal 17 s.d 18 Agustus 2024 sebagai Tim Penilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik KKP.



Gambar 57 Keikutsertaan pada kegiatan Pleno Penilaian Proposal Inovasi Pelayanan Publik

17. Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penghitungan persentase unit

kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang standar, diperoleh dari persentase unit kerja level I dan II yang tergabung dan mendistribusikan informasinya dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih dibandingkan dengan seluruh unit kerja di Ditjen PDSPKP.

Tabel 24 Ikhtisar Pencapaian Unit Kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi thd Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d TW III 2024			TW II 2024	TW III 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (%)	94	94	92	94	133,33	133,33	100	133,33	141,84	141,84	0,00	33,33

Persentase Unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Triwulan III tahun 2024 adalah sebesar 133,33% yakni tercapai 141,84% jika dibandingkan dengan target triwulan II tahun 2024 yang sebesar 94%, atau 141,84% jika dibandingkan dengan target tahun 2024 yakni 94%. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya sebesar 133,33% maka capaian ini tidak mengalami pertumbuhan, namun mengalami peningkatan 33,33% jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 100%.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini Setditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.028.850.000,-. Realisasi anggaran sampai periode Triwulan II sebesar Rp1.528.232.369,00 atau setara dengan 75,33% terhadap total alokasi anggaran.

Pengukuran capaian Manajemen Pengetahuan pada Triwulan II Tahun 2024 menggunakan *Platform Portal Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>). Ditjen

PDSPKP telah melaksanakan beberapa upaya dalam rangka mencapai target indikator kinerja ini antara lain Optimalisasi penggunaan aplikasi manajemen pengetahuan *platform Portal Collaboration Office* (<https://portal.kkp.go.id>).



Gambar 58 Capaian Manajemen Pengetahuan pada Triwulan III Tahun 2024

18. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator kinerja ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Tabel 25 Ikhtisar Pencapaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW I 2024	TW III 2023	s.d TW III 2024			TW II 2024	TW III 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP (Nilai)	-	83	-	93,76	-	89,36	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja Nilai IKPA lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2024 ditargetkan sebesar 93,76. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan secara Semesteran sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan III tahun 2024 serta belum dapat dibandingkan baik dengan target tahunan dan capaian triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Ditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp635.115.955,00 sampai dengan Bulan Juni 2024. Realisasi ini setara dengan 94,22% terhadap pagu anggaran sebesar Rp674.046.000,00.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan guna pencapaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Ditjen PDSPKP sekaligus sebagai tindak lanjut atas rekomendasi tahun 2023 antara lain:

- a. Melaksanakan koordinasi Lingkup Ditjen PDSPKP terkait pengisian Capaian Output bulan Juni, Juli, Agustus dan September Tahun Anggaran 2024 untuk mengoptimalkan capaian IKPA;
- b. Melaksanakan kegiatan pemutakhiran data Rencana Penarikan Dana (RPD) triwulan III dan IV berdasarkan pada akun 51 (belanja Gaji), 52 (belanja Barang) dan 53 (belanja modal) pada Satker Sekretariat dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Ditjen PDSPKP yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2024 di Jakarta.

- c. Melaksanakan kegiatan monitoring capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Satker lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 20 September 2024.



Gambar 60 Monitoring capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Satker lingkup Ditjen PDSPKP

19. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup Ditjen PDSPKP

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai ini diperoleh dari data *input* dan *output* yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu.

Aplikasi SMART DJA Kemenkeu telah dibangun dan efektif digunakan sejak tahun anggaran 2012 untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi SMART DJA Kemenkeu yang mengacu pada PMK tersebut adalah melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas Aspek Implementasi. Namun, seiring dengan penyempurnaan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan

Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, aplikasi SMART DJA Kemenkeu juga telah disempurnakan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran yang mengacu pada PMK tersebut dengan melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja yang mencakup Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks. Penyempurnaan pelaksanaan pengukuran evaluasi kinerja anggaran kembali dilakukan untuk menyesuaikan pelaksanaan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dengan diterbitkannya PMK Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

Tabel 26 Ikhtisar Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP

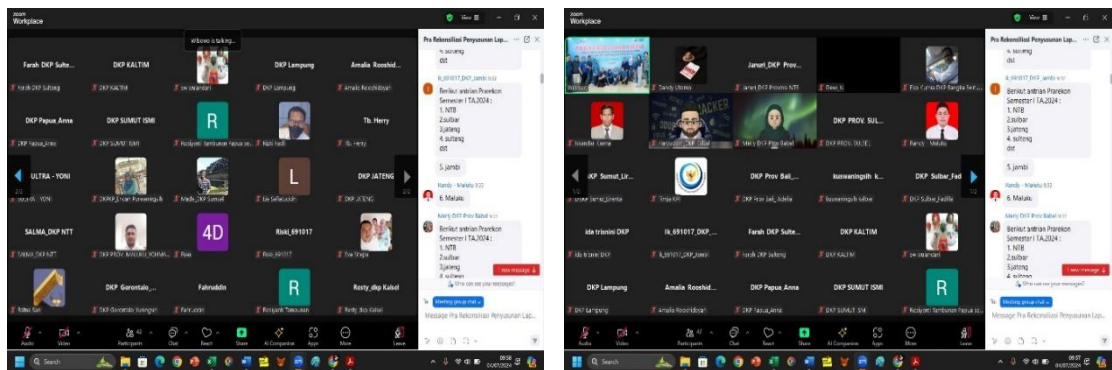
Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2024	s.d TW III 2024			TW II 2024	TW III 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen PDSPKP (Nilai)	-	-	-	86	-	-	-	-	-	-	-	-

Nilai NKA lingkup Ditjen PDSPKP pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 86. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan III tahun 2024 serta belum dapat dibandingkan baik dengan target tahunan dan capaian triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran, Setditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.210.000.000,00 dengan total realisasi sampai dengan September sebesar Rp991.854.945,00 atau setara dengan 81,94%.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- a) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Satker Sekeretaryat Ditjen PDSPKP dan Tugas Pembantuan secara berkala terkait pelaporan Capaian Output, sasaran kegiatan dan sasaran program secara berkala.



Gambar 61 koordinasi dengan seluruh Satker Sekeretaryat Ditjen PDSPKP dan Tugas Pembantuan

- b) Keikursertaan dalam rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja serta pemantauan kinerja anggaran dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2024 sesuai dengan Undangan Kepala Biro Keuangan Nomor B.1946/SJ.2/TU.330/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024.
- c) Keikutsertaan pada rapat monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran belanja dan pemantauan NKA tahun 2024 pad tanggal 4 September 2024 sesuai dengan Undangan Kepala Biro Keuangan Nomor B.3309/SJ.2/TU.330/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024.

20. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Ditjen PDSPKP

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PDSPKP merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kinerja pengawasan intern KKP dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 27 Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW I 2024	TW III 2024	TW II 2024			TW III 2024	TW II 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Ditjen PDSPKP pada tahun 2024 ditargetkan 80%. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan III serta belum dapat dibandingkan baik dengan target tahunan dan capaian triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa di lingkungan Ditjen PDSPKP, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp3.529.128.910.000,- sampai dengan Bulan September 2024 dari pagu Rp4.219.446.000,-. Realisasi ini setara dengan 83,64%.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

1. Melaksanakan rapat Update RUP dan Pencatatan Realisasi Paket PBJ Tahun Anggaran 2024 lingkup Ditjen PDSPKP secara berkala yaitu pada tanggal 2 dan 5 Juli, 14 s.d 15 Agustus, 25 dan 27 September 2024. Kegiatan bertujuan untuk melakukan update Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) setelah revisi POK terakhir dan pencatatan realisasi Paket PBJ non Tender dan swakelola Tahun Anggaran 2024 pada Aplikasi LPSE (AMEL);



Gambar 62 Update RUP dan Pencatatan Realisasi Paket PBJ Tahun Anggaran 2024 lingkup Ditjen PDSPKP

2. Melaksanakan Rapat Updating Progress Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP pada tanggal 18 Juli, 9 Agustus, 29 Agustus, dan 26 September 2024. Kegiatan dilakukan untuk melakukan update progress pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkup Ditjen PDSPKP;



Gambar 63 Updating Progress Pengadaan Barang/Jasa lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

3. Melaksanakan pada Rapat Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan III Tahun 2024 pada Ditjen PDSPKP pada tanggal 19 dan 20 September 2024 di Raiser Ikan Hias, Cibinong, Jawa Barat. Tujuan Rapat adalah Untuk Melaksanakan Rapat Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan III Tahun 2024 pada Ditjen PDSPKP.

4. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Ditjen PDSPKP

Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Ditjen PDSPKP. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai.

Kegiatan yang dikategorikan prioritas/strategis antara lain memenuhi kriteria berikut :

- Memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
- Memiliki anggaran besar;
- Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP;
- Mendukung pencapaian prioritas nasional;
- Merupakan arahan direktif presiden;
- Pertimbangan lainnya yang relevan.

Tabel 28 Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d TW III 2024			TW II 2024	TW III 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas/strategis Ditjen PDSPKP ditargetkan 80%. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan III tahun 2024

serta belum dapat dibandingkan baik dengan target tahunan dan capaian triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp360.000.000,00 sampai dengan Bulan September 2024 dari pagu Rp480.000.000,- atau setara dengan 75% untuk merealisasikan indikator kinerja Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2024.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain :

- a. Melaksanakan rapat Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Ditjen PDSPKP tahun 2020 – 2024 pada tanggal 9 Agustus 2024;
- b. Melaksanakan rapat Pemetaan dan Updating Pemanfaatan Bantuan Pemerintah dilokasi Sampling Penilaian Efektifitas Bantuan Pemerintah/Kegiatan Prioritas pada tanggal 10 dan 11 September 2024;
- c. Melaksanakan monitoring evaluasi bantuan pemerintah di lokasi sampling penilaian indikator kinerja Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2024 yaitu Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Purworejo pada tanggal 19 s.d 21 September 2024.



Gambar 64 Pemetaan dan Updating Pemanfaatan Bantuan Pemerintah dilokasi Sampling Penilaian Efektifitas Bantuan Pemerintah/Kegiatan Prioritas

5. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Ditjen PDSPKP

Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen PDSPKP merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern Ditjen PDSPKP dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen PDSPKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di lingkungan Ditjen PDSPKP diukur melalui pemenuhan beberapa indikator berikut:

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2025;
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan Triwulan I tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi rusak berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan I Tahun 2024;
- Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Tabel 29 Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	TW III 2024			TW II 2024	TW III 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Ditjen PDSPKP (%)	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2024 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN di Lingkungan Setditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 80%. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan III tahun 2024 serta belum dapat dibandingkan baik dengan target tahunan dan capaian triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.010.180.000,00. Realisasi anggaran sampai periode Triwulan III sebesar Rp816.608.000,00. Realisasi anggaran ini setara dengan 80,84% terhadap total alokasi anggaran.

Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

- 1) Melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN Semester I Tahun 2024 lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 9 s.d 12 Juli 2024. Output kegiatan dimaksud yaitu Laporan Keuangan dan BMN yang sudah melalui proses verifikasi, reviu dengan Inspektorat IV dan otorisasi oleh Tim Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Ditjen PDSPKP;
- 2) Melaksanakan kegiatan koordinasi Pengakhiran Kerja Sama Pembangunan dan Pengembangan Pasar (Mal) Ikan Higienis Pejompongan di kantor PD Pembangunan Sarana Jaya dan dihadiri oleh PT Putra Kirana Sentosa dan KKP tanggal 3 Juli 2024. Tujuan dari kegiatan adalah untuk menyusun rencana dalam penyusunan Berita Acara pengakhiran kerja sama dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan PIH Pejompongan. Selanjutnya dilakukan koordinasi lanjutan dengan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tanggal 15 Juli 2024 terkait dengan penyerahan surat kesediaan menerima hibah PIH Pejompongan di kantor Pemprov DKI Jakarta dan tanggal 16 Juli 2024 dilakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI c.q. KPKNL Jakarta II terkait dengan penghapusan BMN dengan sebab-sebab lain;

- 3) Melaksanakan rapat pembahasan tindak lanjut somasi I Kuasa Hukum PT PKS terhadap Aset BMN berupa PIH, tujuan dari kegiatan adalah untuk menjabarkan poin-poin beserta penjelasan terkait dengan somasi I Kuasa Hukum PT PKS bersama dengan tim hukum;
- 4) Melaksanakan pertemuan dengan PD Sarana Jaya terkait dengan Berita Acara Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama di Hotel Novotel Jakarta pada tanggal 26 Juli 2024. Tujuan dari kegiatan adalah untuk menyusun Berita Acara Pengakhiran Kerja Sama PIH Pejompongan;
- 5) Melaksanakan pembahasan BAST Pengakhiran Kerjasama Pengelolaan dan Pengembalian Tanah PIH Pejompongan dapat diteruskan/tidak yang dilaksanakan pada tanggal 1 dan 5 Agustus 2024 dan pada tanggal 3 September 2024, dilaksanakan rapat rencana tindak lanjut pengelolaan PIH Pejompongan yang membahas rencana pengelolaan PIH Pejompongan oleh PD Pembangunan Sarana Jaya saat proses hibah dan pasca hibah yang akan dihibahkan oleh KKP kepada Pemda DKI Jakarta;
- 6) Melaksanakan rapat rencana perbaikan BMN PIM Muara Baru antara PT Perindo, Inpektorat Jenderal IV KKP, Konsultan dan Ditjen PDSPKP yang dilaksanakan tanggal 3 September 2024. Tujuan kegiatan adalah pembahasan kesepakatan item BMN dan besaran nilai perbaikan yang akan dilakukan oleh Ditjen PDSPKP dan nantinya dijadikan piutang kepada PT Perindo;
- 7) Melaksanakan rapat pembahasan permasalahan CS 1000 ton bersama Inspektorat Jenderal IV, Biro Hukum, Biro Umum dan PBJ, Biro Keuangan, BBP3KP dan Timja KP untuk mencari solusi terhadap pembayaran sewa CS 1000 ton oleh PT MBN yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2024;
- 8) Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun 2026 Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP pada tanggal 11 s.d 13 September 2024 di Bandung untuk menyusun dokumen RP3BMN, Dokumen Pemeliharaan dan Dokumen Pengadaan BMN pada tahun 2026.



Gambar 65 Rapat Pemabahasan Kesepakatan BMN PIM dan Penyusunan RKBMN

6. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP

Ketersediaan data yang valid, mutakhir dan dapat dipercaya menjadi kebutuhan setiap organisasi. Kondisi lingkungan yang sangat dinamis menuntut Ditjen PDSPKP untuk mampu menyediakan data secara tepat, akurat dan terkini. Ketersediaan data tersebut akan banyak membantu dalam proses perencanaan, formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan. Data PDSPKP yang akurat akan menghasilkan proses perencanaan yang benar dan pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan para pengolah maupun pemasar hasil perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal PDSPKP diberikan amanat untuk menjadi Unit Data Eselon I yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola data lingkup Ditjen PDSPKP. Beberapa kegiatan pengelolaan data lingkup Ditjen PDSPKP antara lain pengumpulan data pelaku usaha dan produksi, verifikasi dan validasi data serta analisis data bidang PDSPKP.

Tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan data KUSUKA dan Produksi, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional serta kepatuhan terhadap implementasi

rencana aksi data geospasial kelautan dan perikanan. Dalam rangka menentukan parameter termasuk kedalam kategori tidak patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh terdapat 3 Variabel Perhitungan, yaitu:

- 1) Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (X1), Bobot Nilai (30%)
- 2) Persentase Data Produksi KP yg Tervalidasi (X2), Bobot Nilai 40%.
- 3) Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (X3), Bobot Nilai 30%

Tabel 30 Ikhtisar Pencapaian Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW III	% Realisasi s.d TW III Terhadap Target 2024	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	Tahun 2024	TW III 2024	TW II 2024	TW III 2023	s.d TW III 2024			TW II 2024	TW III 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Ditjen PDSPKP (%)	-	-	-	91	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2024 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Ditjen PDSPKP ditargetkan sebesar 91. Penghitungan capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan sehingga capaiannya belum bisa dihitung pada triwulan III tahun 2024 serta belum dapat dibandingkan baik dengan target tahunan dan capaian triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja ini Ditjen PDSPKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3.519.007.000,00. Realisasi anggaran sampai periode Triwulan III sebesar Rp2.157.983,00 atau setara dengan 61,32% terhadap total alokasi anggaran.

Dalam rangka pencapaian kepatuhan pengelolaan data lingkup Ditjen PDSPKP, beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal PDSPKP selama Triwulan III 2024 antara lain:

- a. Melaksanakan Rapat Review Proses Bisnis Data Stok Ikan Gudang Beku Satu Data Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2024;
- b. Melaksanakan Rapat persiapan Monev Implementasi Satudata pada tanggal 10 Juli 2024;
- c. Melaksanakan Sosialisasi Satu Data Statistik PDSPKP Tahun 2024 di Provinsi Papua yang dilaksanakan pada tanggal 23 s.d 26 Juli 2024;



Gambar 66 Sosialisasi Satu Data Statistik PDSPKP Tahun 2024

- d. Melaksanakan rapat Monitoring Pendataan UPI Menengah Besar yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2024;
- e. Melaksanakan kegiatan Satu Data Bidang PDSPKP Tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 6 s.d 9 Agustus 2024;
- f. Melaksanakan Pembahasan Progres Pengembangan Modul KUSUKA Lingkup DJPKRL dan DJPDSPKP yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2024;
- g. Melaksanakan rapat Pra Validasi Nasional Satudata Kelautan dan Perikanan Semester I Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2024;
- h. Melaksanakan pada rapat persiapan validasi satu data bidang PDSPKP Semester I Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2024;
- i. Melaksanakan pada validasi Satu Data Bidang PDSPKP Semester I Tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 14 September 2024.

C. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2024, Alokasi anggaran pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan adalah sebesar Rp386.899.151.000,00 yang seluruhnya merupakan APBN rupiah murni. Dari pagu anggaran tersebut, terdapat blokir sebesar Rp58.301.389.000,- sehingga pagu anggaran efektif menjadi sebesar Rp328.597.762.000,-. Penyerapan anggaran Ditjen PDSPKP sampai dengan triwulan III tahun 2024 adalah sebesar Rp167.818.373.874,- atau setara dengan 43,36% terhadap total pagu anggaran awal atau 51,06% terhadap pagu anggaran pasca blokir (pagu efektif). Berdasarkan data omspan terdapat outstanding kontrak sebesar Rp60,570,783,118,00, sehingga realisasi anggaran Ditjen PDSPKP menjadi 69,50% dari pagu efektif atau 59,03% dari pagu anggran awal.

Tabel 31. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Kewenangan Triwulan III Tahun 2024

No	Kewenangan	Pagu Anggaran (Rp)	Blokir	Pagu Anggaran Pasca AA (Rp)	Realisasi Anggaran	% terhadap pagu awal	% terhadap pagu pasca AA
1	Pusat	332.063.886.000	49.437.929.000	282.625.957.000	140.565.463.129	42,33%	49,74%
2	UPT	38.221.254.000	3.827.715.000	34.393.539.000	23.271.355.979	60,89%	67,66%
3	Tugas Pembantuan	16.614.011.000	5.035.745.000	11.578.266.000	3.981.554.766	23,97%	34,39%
Total		386.899.151.000	58.301.389.000	328.597.762.000	167.818.373.874	43,36%	51,06%

Sumber: Aplikasi Omspan Kemenkeu Realisasi Sampai dengan September 2024

Realisasi `Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Kewenangan Triwulan III Tahun 2024 terbagi menjadi kewenangan Pusat, UPT dan Tugas Pembantuan. Dari data realisasi dimaksud realisasi Anggaran Tugas Pembantuan sebesar 23,97% (paling rendah) dikarenakan Pengesahan revisi anggaran tugas

pembantuan baru ditetapkan pada periode triwulan III yaitu tanggal 8 Mei 2024 sebagaimana surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-320/AG/AG.3/2024.

Tabel 32. Realisasi Penyerapan Anggaran Ditjen PDSPKP Menurut Jenis Kegiatan Triwulan III Tahun 2024

No	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Blokir	Pagu Anggaran Pasca AA (Rp)	Realisasi Anggaran	% terhadap pagu awal	% terhadap pagu pasca AA
1	Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	57.574.000.000	11.652.900.000	45.921.100.000	5.552.602.170	9,64%	12,09%
2	Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	78.740.900.000	14.106.222.000	64.634.678.000	40.723.351.123	51,72%	63,01%
3	Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	71.858.100.000	9.984.869.000	61.873.231.000	17.394.080.779	24,21%	28,11%
4	Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan	22.723.500.000	4.916.515.000	17.806.985.000	10.516.481.824	46,28%	59,06%
5	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PDSPKP	147.402.651.000	15.035.340.000	132.367.311.000	89.858.890.140	60,96%	67,89%
6	Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan	8.600.000.000	2.605.543.000	5.994.457.000	3.772.967.838	43,87%	62,94%
Total		386.899.151.000	58.301.389.000	328.597.762.000	167.818.373.874	43,38%	51,07%

Sumber: Aplikasi Omspan Kemenkeu Realisasi sampai dengan September 2024

Realisasi Anggaran Ditjen PDSPKP berdasarkan kegiatan Triwulan III Tahun 2024 terbagi menjadi enam jenis kegiatan, dari keenam jenis kegiatan, kegiatan logistik hasil kelautan dan perikanan paling rendah realisasinya yaitu sebesar 12,09% (paling rendah), hal ini dikarenakan sebagian besar kegiatan adalah belanja 526 (kontraktual), terdapat outstanding kontrak sebesar

Rp31.180.457.114, sehingga dengan outstanding kontrak tersebut realisasi kegiatan logistik hasil kelautan dan perikanan menjadi 79,99%.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Ditjen PDSPKP Triwulan III Tahun 2024 menyajikan capaian Sasaran Program dan Indikator Kinerja. Capaian dimaksud selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian periode sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.

Dalam upaya pencapaian indikator kinerja Ditjen PDSPKP berbagai upaya telah dilakukan seperti koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana aksi dalam rangka mencapai indikator kinerja.

Terdapat perubahan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga tidak selaras dengan Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020 – 2024, sehingga pembahasan capaian dalam Laporan Kinerja menggunakan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Indikator kinerja yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No	IKU	Satuan	Target	
			Renstra	PK
1	Nilai PNBP Ditjen PDSPKP (Rp. Miliar)	Rp. Miliar	-	10,26
2	Tenaga kerja yang terlibat bidang Penguatan Daya Saing Produk KP (Orang)	Orang	60.000	66.000

*Indikator kinerja belum tercantum dalam Renstra Ditjen PDSPKP Tahun 2020-2024

Secara umum, indikator kinerja Ditjen PDSPKP yang dapat dihitung pada Triwulan III tahun 2024 telah tercapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Capaian Kinerja Organisasi (NKO) yang terukur pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) mencapai 103,64.

B. Permasalahan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja Ditjen PDSPKP Triwulan III tahun 2024, terdapat 1 indikator kinerja yang tidak mencapai target yakni Nilai Ekspor Hasil Perikanan dan Pembiayaan usaha kelautan dan perikanan melalui kredit program. Adapun permasalahan dan rencana tindak lanjut ke depan antara lain:

Tabel 33 Permasalahan dan Rekomendasi atas Indikator kinerja yang tidak mencapai target pada Triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
Nilai Ekspor Hasil Perikanan	- Tren penurunan harga komoditas, kondisi global dan perlambatan ekonomi dunia serta aktivitas produksi atau industri di berbagai negara. Kondisi ini menyebabkan permintaan global juga menurun. Berdasarkan data BPS tahun 2024 secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari–Juni 2024 mencapai US\$125,09 miliar atau turun 2,76 persen dibanding periode yang sama tahun 2023. Sejalan dengan total ekspor, nilai ekspor nonmigas yang mencapai US\$117,19 miliar juga turun 2,99 persen. - Perlambatan ekonomi yang terjadi di negara-negara utama tujuan ekspor produk perikanan seperti di Amerika Serikat telah mempengaruhi daya beli masyarakat. Adapun rincian penurunan ekspor produk perikanan Indonesia di pasar AS	- Melakukan koordinasi tindak lanjut atas penyelesaian perundingan dan penyelesaian hambatan ekspor lainnya; - Melakukan koordinasi penyelesaian hambatan ekspor udang ke Amerika Serikat atas tuduhan CVD dan Anti-dumping.

C. Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024

Tindak lanjut yang telah dilakukan pada Triwulan III tahun 2024 atas rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan II tahun 2024 antara lain :

Tabel 34 Tindak Lanjut Rekomendasi pada Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2024

No	R ekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan II Tahun 2024	Tindak Lanjut pada Triwulan III Tahun 2024
1	- Melakukan koordinasi tindak lanjut atas penyelesaian perundingan dan penyelesaian hambatan ekspor lainnya; - Melakukan koordinasi penyelesaian hambatan ekspor udang ke Amerika Serikat atas tuduhan CVD dan Anti-dumping.	Melakukan finalisasi <i>Operational Procedure</i> Protokol Perubahan <i>Indonesia Japan Economic Partnership Agreement</i> (IJEPA). Indonesia dan Jepang telah menyelesaikan perundingan Protokol Perubahan IJEPA melalui penandatanganan naskah perjanjian oleh Menteri Perdagangan RI dengan Menteri Luar Negeri Jepang pada tanggal 8 Agustus 2024 secara virtual. Hasil perundingan IJEPA tersebut telah mengakomodasi kepentingan Indonesia khususnya pembebasan 4 pos tarif produk olahan tuna dan cakalang asal Indonesia dimana 2 (dua) produk (HS 1604.14.091 dan HS 1604.14.099) dengan persyaratan tambahan ukuran panjang bahan baku cakalang tidak kurang dari 30 cm. KKP dan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) Jepang telah melakukan finalisasi <i>Operational Procedure</i> terkait dengan persyaratan panjang bahan baku cakalang tersebut dalam bentuk sertifikat barang. Selain 4 (empat) pos tarif olahan tuna, Indonesia juga mendapatkan

No	R ekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan II Tahun 2024	Tindak Lanjut pada Triwulan III Tahun 2024
		pembebasan tarif 0% sebanyak 67 pos tarif produk perikanan antara lain yellowfin tuna beku, fillet tilapia segar, fillet swordfish beku, kekerangan, olahan lobster, dan rajungan beku. Kesepakatan Protokol Perubahan IJEPA akan mulai berlaku saat perjanjian diimplementasikan setelah melalui proses ratifikasi di parlemen kedua negara dan diharapkan akan berlaku efektif tahun 2025. • Melaksanakan serangkaian pertemuan dengan <i>US Department of Commerce</i> (USDOC) dan berbagai pihak terkait (Lawyer, <i>National Fisheries Institute</i>, dan Importir udang Indonesia) di Washington DC pada tanggal 19 – 22 Agustus 2024 dalam rangka penanganan kasus Anti-Dumping (AD) Udang Beku asal Indonesia. Tujuan utama (<i>high call position</i>) penanganan AD pada tahap <i>final determination</i> USDOC adalah Indonesia mendapatkan nilai de-minimis (dumping margin dibawah 2%) sehingga tidak dikenakan bea masuk AD, atau USITC menetapkan tidak ada kerugian industri udang AS sebagaimana dituduhkan oleh petitioner.

Data dukung tindak lanjut atas rekomendasi pada laporan kinerja periode triwulan II terdapat tautan https://drive.google.com/drive/folders/1isBSABOxzAPW5xK7485u_rgmy9jvNO3c

LAMPIRAN